



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 674 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis, menyebutkan bahwa pemetaan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Tanjungpinang ditetapkan melalui Keputusan Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembar Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
17. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS

KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memuat proses bisnis Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari:

a. proses utama, yaitu proses ini berhubungan langsung dengan kegiatan dalam memenuhi permintaan masyarakat atau bersampak langsung kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas pembangunan manusia;
2. peningkatan kualitas pembangunan gender;
3. peningkatan pertumbuhan ekonomi;
4. pelestarian seni dan budaya lokal;
5. peningkatan pemerataan infrastruktur;
6. pelestarian Lingkungan Hidup;
7. peningkatan iklim investasi dan usaha yang kondusif;
8. penyerapan tenaga kerja.

b. proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses utama, yang terdiri dari:

1. tata kelola pemerintahan;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. peta sub proses, yaitu proses teknis dari proses utama dan proses pendukung yang saling berhubungan dengan proses-proses lainnya; dan

d. peta lintas fungsi, yaitu peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi/perangkat daerah yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dilakukan evaluasi dan pemantauan relevansi dan efektifitasnya oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kota Tanjungpinang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Desember 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021

TABEL INSTRUMEN PENENTUAN PROSES

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.	Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia dan Kesetaraan Gender	• Meningkatnya akses pendidikan dan literasi • Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan • Meningkatnya prestasi pemuda	TPI.01. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	PROSES UTAMA	TPI.01.01. Peningkatan Akses Pendidikan dan Literasi TPI.01.02. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan TPI.01.03. Peningkatan Prestasi Pemuda	TPI.01.01.CFM.01. Pengelolaan Pendidikan TPI.01.01.CFM.02. Pembinaan Perpustakaan TPI.01.02.CFM.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat TPI.01.02.CFM.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) TPI.01.02.CFM.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan TPI.01.02.CFM.04. Pengembangan Kapasitas	a. DISDIK b. DKP2KB c. DPK d. DISPORA e. SEKOLAH f. DPUPR g. BAPPELIT BANG h. INSPEKTORAT i. BPKAD j. DPRD k. K/L terkait l. DINKES Prov. m. PERPUS Prov. n. OKP

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
							Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya pemenuhan hak perempuan, anak dan perlindungan sosial	TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender	PROSES UTAMA	TPI.02.01. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak TPI.02.02. Perlindungan Sosial	TPI.02.01.CFM.01. Perlindungan Perempuan TPI.02.01.CFM.02. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan TPI.02.01.CFM.03. Pemenuhan Hak Anak (PHA) TPI.02.02.CFM.01. Perlindungan dan Jaminan Sosial TPI.02.02.CFM.02. Rehabilitasi Sosial	a. DP3APM b. DINSOS c. DISDUKCAPIL d. DISDIK e. DKP2KB f. BAPPELITBANG g. INSPEKTORAT h. BPKAD i. DPRD j. Kecamatan k. Kelurahan l. RT/RW m. Masyarakat n. BPJS o. K/L terkait
2	Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan	- Meningkatnya Kunjungan wisata - Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha	TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	PROSES UTAMA	TPI.03.01. Peningkatan Kunjungan Wisata TPI.03.02. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil	TPI.03.01.CFM.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata TPI.03.01.CFM.02. Pemasaran Pariwisata TPI.03.01.CFM.03. Pengembangan	a. DISBUDPAR b. DISPERDAGIN c. DP3 d. BAPPELITBANG

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
		dan jasa	kecil Meningkatnya Produksi Perikanan			TPI.03.03. Peningkatan Produksi Perikanan	Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TPI.03.01.CFM.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual TPI.03.02.CFM.01. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan TPI.03.02.CFM.02. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen TPI.03.02.CFM.03. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting TPI.03.02.CFM.04. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri TPI.03.02.CFM.05. Perencanaan dan	e. INSPEKTORAT f. BPKAD g. DPRD h. DKP Prov. i. DISPERIN DAG Prov. j. TACB KOTA TPI k. BPCB BAT SANGKAR l. K/L terkait

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
							Pembangunan Industri TPI.03.02.CFM.06. Penilaian Kesehatan KSP/USP TPI.03.02.CFM.07. Koperasi Pendidikan dan Latihan TPI.03.02.CFM.08. Perkoperasian Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) TPI.03.02.CFM.09. Pengembangan UMKM TPI.03.03.CFM.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap TPI.03.03.CFM.02. Pengelolaan Perikanan Budidaya	
3.	Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis,	Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya kelestarian budaya melayu	TPI.04. Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	PROSES UTAMA	TPI.04.01. Peningkatan Kelestarian Budaya Melayu	TPI.04.01.CFM.01. Pengembangan Kebudayaan TPI.04.01.CFM.02. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	a. DISBUDP AR b. TACB KOTA TPI c. BPCB BAT SANGKAR d. BAPPELIT BANG e. INSPEKTO

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
	bertoleransi dan kebhinekaan							RAT f. BPKAD g. DPRD
4.	Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur	PROSES UTAMA	TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur	TPI.05.01.CFM.01. Pengembangan Perumahan TPI.05.01.CFM.02. Penataan Bangunan dan Lingkungannya TPI.05.01.CFM.03. Pengembangan Permukiman TPI.05.01.CFM.04. Penyelenggaraan Jalan TPI.05.01.CFM.05. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) TPI.05.01.CFM.06. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) TPI.05.01.CFM.07. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase TPI.05.01.CFM.08. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	a. DISPERKIN b. DPUPR c. BAPPELITBANG d. INSPEKTORAT e. BPKAD f. DPRD g. UKPBJ h. DPUPR Prov. i. K/L terkait j. Swasta k. Masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	TPI.06. Pelestarian Lingkungan Hidup	PROSES UTAMA	TPI.06.01. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	TPI.06.01.CFM.01. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat TPI.06.01.CFM.02. Pengelolaan Persampahan TPI.06.01.CFM.03. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. DLH b. DISDIK c. SEKOLAH d. BAPPELIT BANG e. INSPEKTORAT f. BPKAD g. DPRD h. K/L terkait
		Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya realisasi investasi	TPI.07. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif	PROSES UTAMA	TPI.07.01. Peningkatan Realisasi Investasi	TPI.07.01.CFM.01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. DPMPSTSP b. BAPPELIT BANG c. INSPEKTORAT d. BPKAD e. DPRD f. K/L terkait
			Meningkatnya penyerapan tenaga Kerja	TPI.08. Penyerapan Tenaga Kerja	PROSES UTAMA	TPI.08.01. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	TPI.08.03.CFM.01. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja TPI.08.03.CFM.02. Penempatan Tenaga Kerja TPI.08.03.CFM.03. Perencanaan Tenaga Kerja	a. DISNAKER b. KOPUM c. BAPPELIT BANG d. INSPEKTORAT e. BPKAD f. DPRD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
								f. BLK g. SEKOLAH KEJURUAN
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah - Meningkatnya penerapan E-government	TPI.09. Tata Kelola Pemerintahan	PROSES PENDUKUNG	TPI.09.01. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah TPI.09.02. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah TPI.09.03. Penerapan E-government	TPI.09.01.CFM.01. Perekonomian dan Pembangunan TPI.09.02.CFM.01. Penyelenggaraan Pengawasan TPI.09.02.CFM.02. Pengelolaan Barang Milik Daerah TPI.09.02.CFM.03. Pengelolaan keuangan daerah TPI.09.03.CFM.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika TPI.09.03.CFM.02. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	a. SETDA b. INSPEKTORAT c. BPKAD d. BAPPELITBANG e. DISKOMINFO f. DPRD
			- Meningkatnya Pendapatan pajak dan retribusi daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan	TPI.010. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROSES PENDUKUNG	TPI.10.01. Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah TPI.10.02. Peningkatan Kualitas Pelayanan	TPI.10.01.CFM.01. Pengelolaan Pendapatan Daerah TPI.10.02.CFM.01. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat TPI.10.02.CFM.02. Pendaftaran	a. SETDA b. BPKAD c. BPPRD d. INSPEKTORAT e. BAPPELITBANG f. DISDUKC

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES (UTAMA/ PENDUKUNG /LAINNYA)	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI	ORGANISASI TERKAIT
			publik Meningkatnya penegakan peraturan daerah			TPI.10.03. Publik Penegakan Peraturan Daerah	TPI.10.02.CFM.03. Penduduk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMPTSP) TPI.10.03.CFM.01. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	APIL g. DPMPTSP h. SATPOL PP i. DPRD

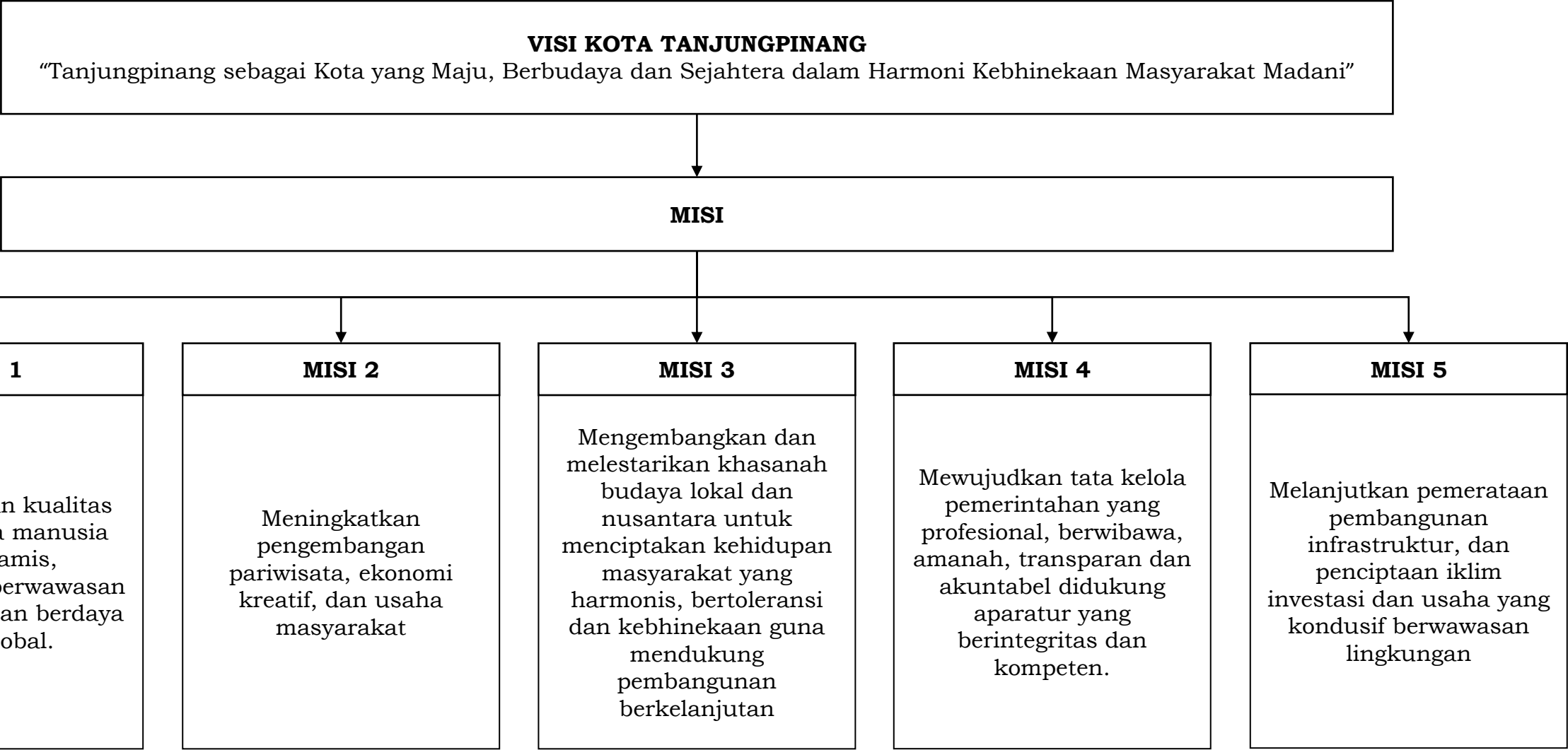
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

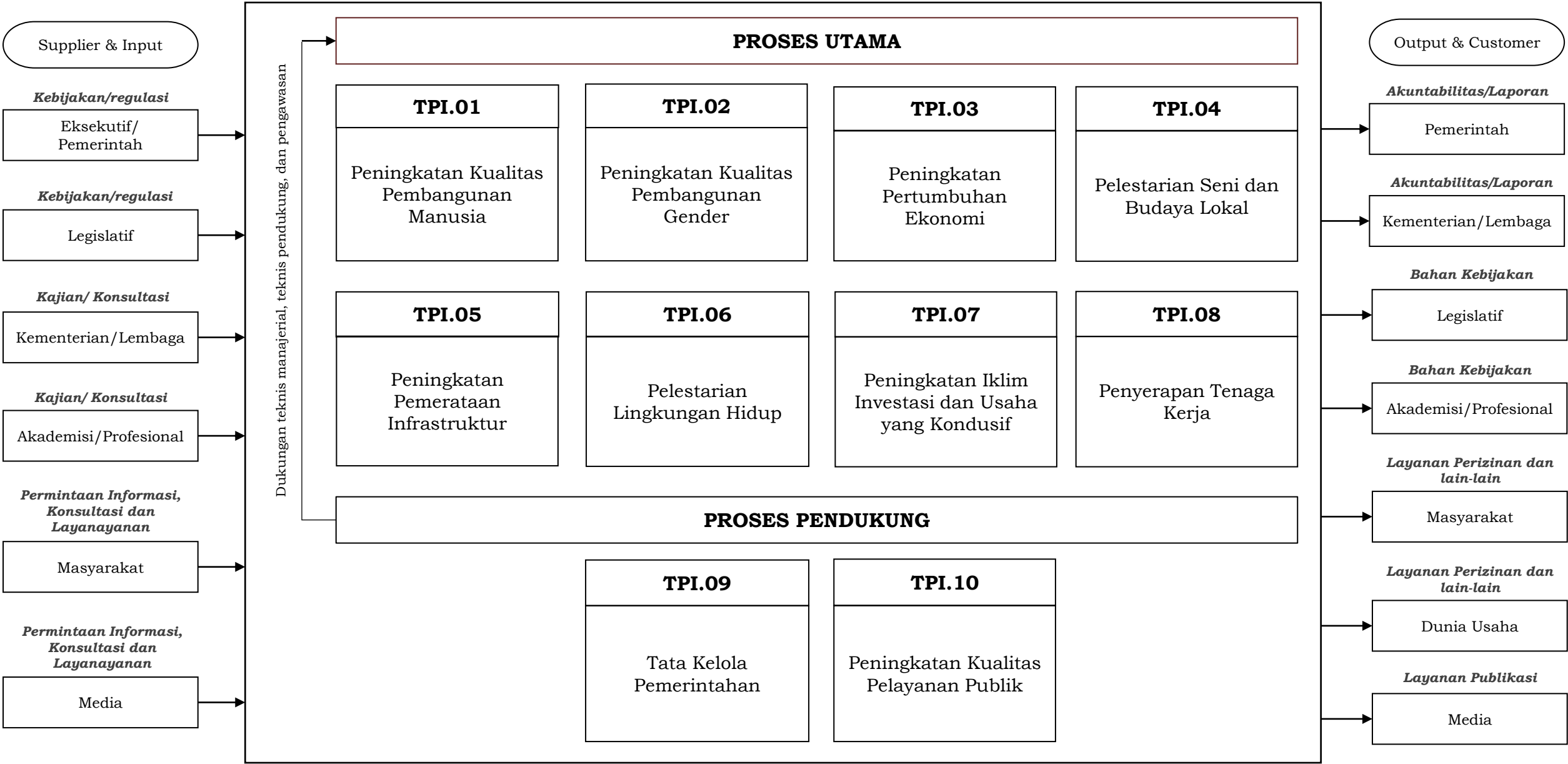
RAHMA

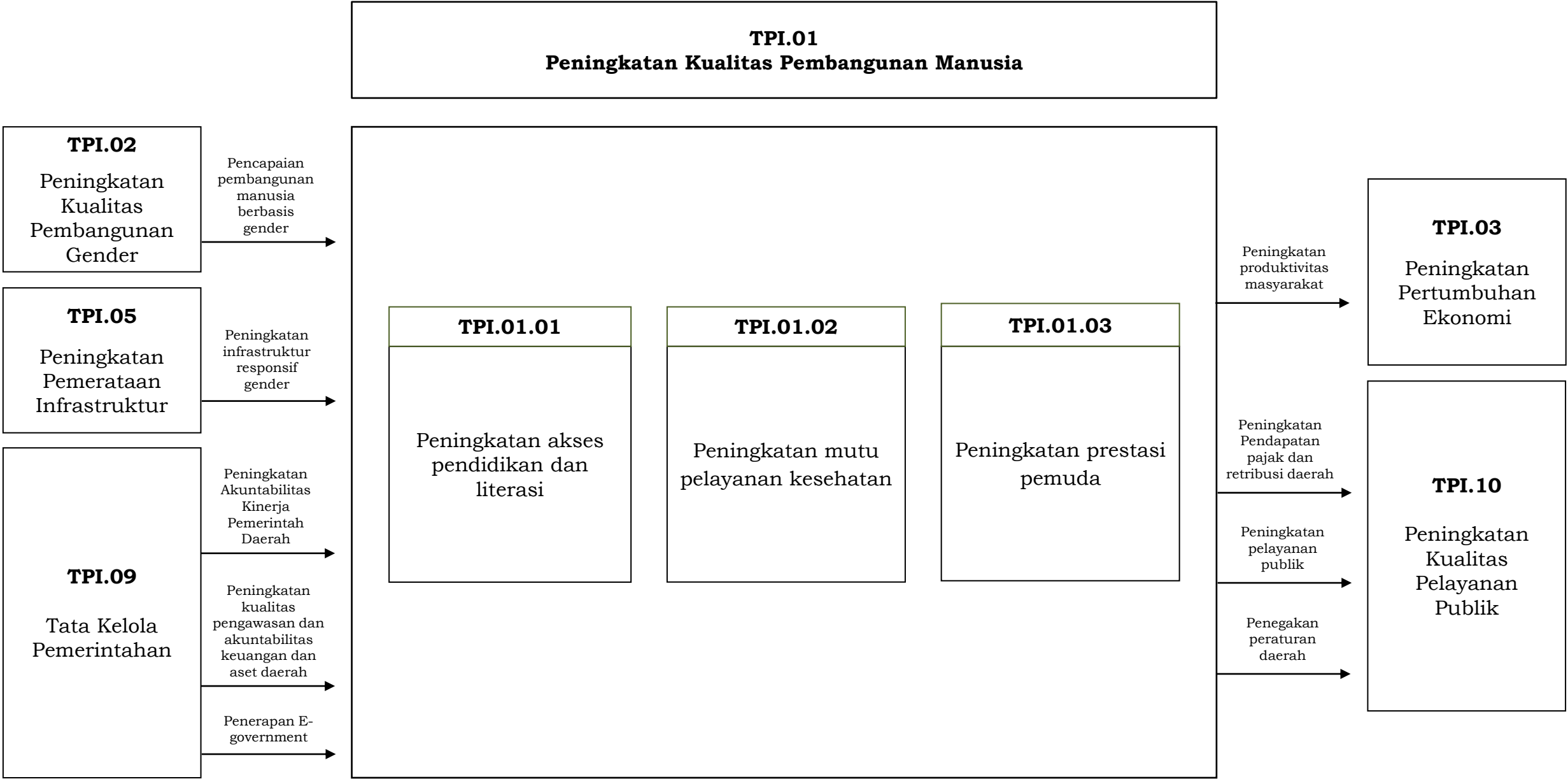
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

LIA ADHAYATNI, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021

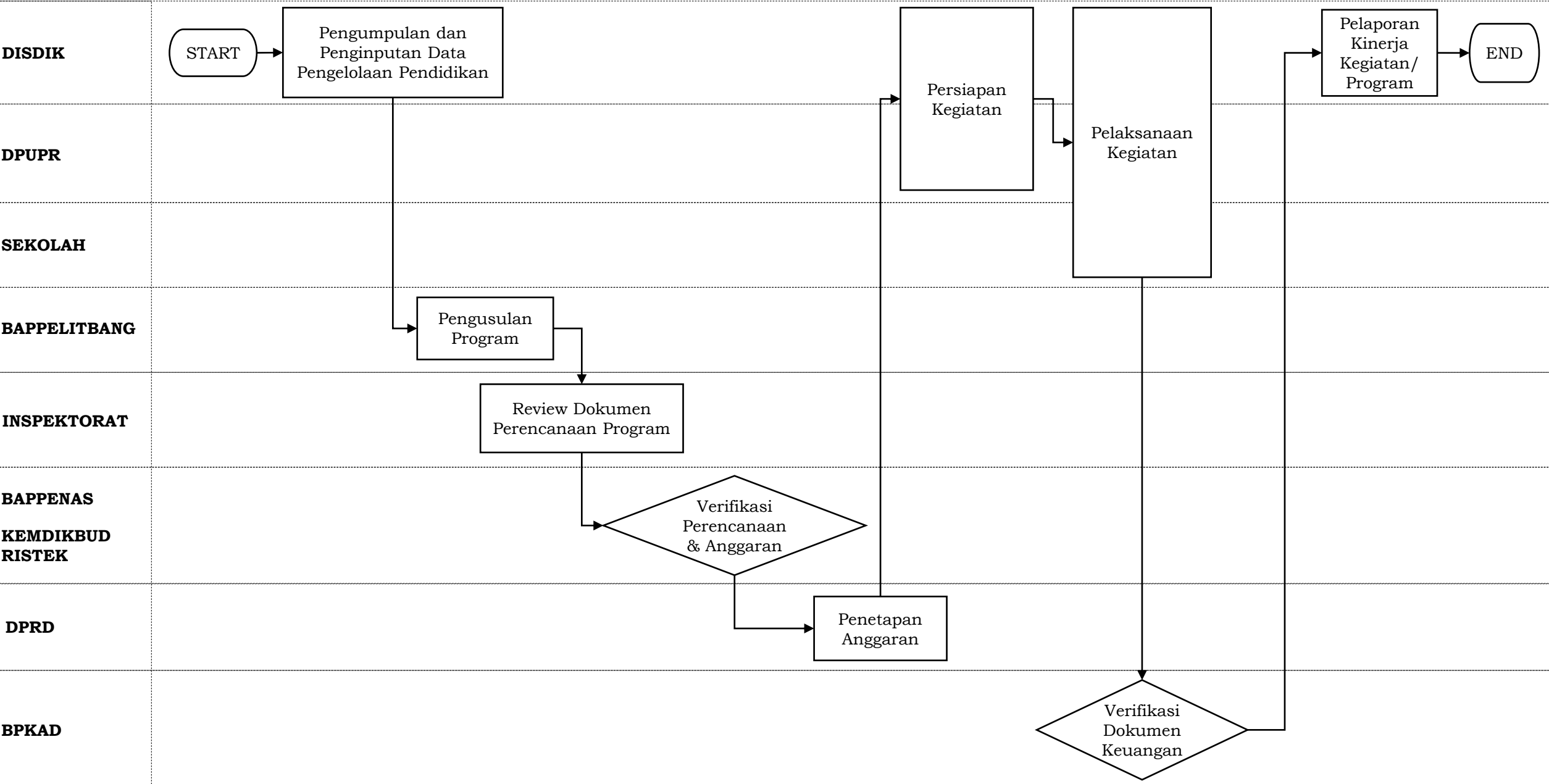


PETA PROSES BISNIS KOTA TANJUNGPINANG





Peta Proses : TPI.01. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
Sub Proses : TPI.01.01. Peningkatan Akses Pendidikan dan Literasi
Lintas Fungsi : TPI.01.01.CFM.01. Pengelolaan Pendidikan



Peta Proses

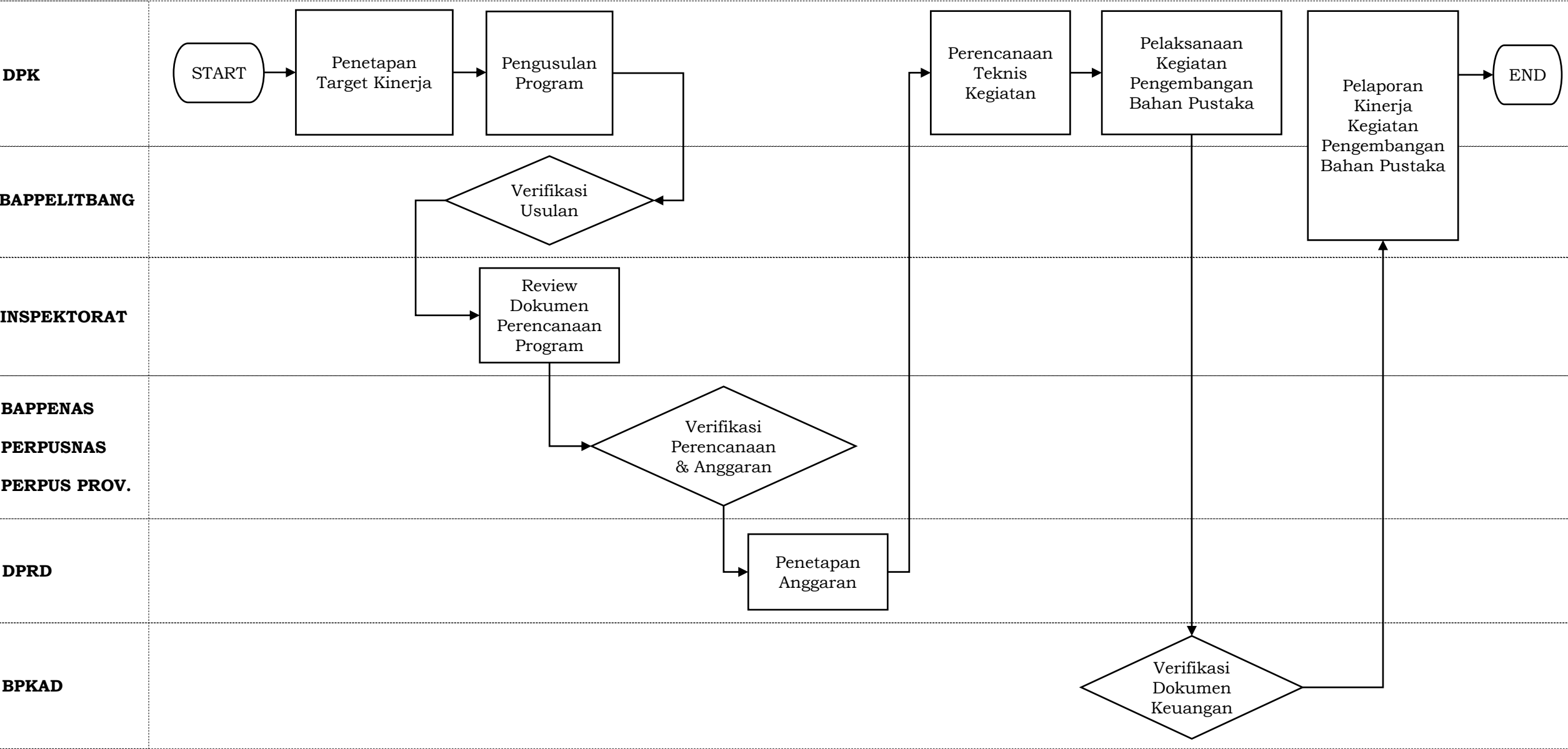
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.01. Peningkatan Kualitas Pembangunan

: TPI.01.01. Peningkatan Akses Pendidikan dan Literasi

: TPI.01.01.CFM.02. Pembinaan Perpustakaan



Peta Proses

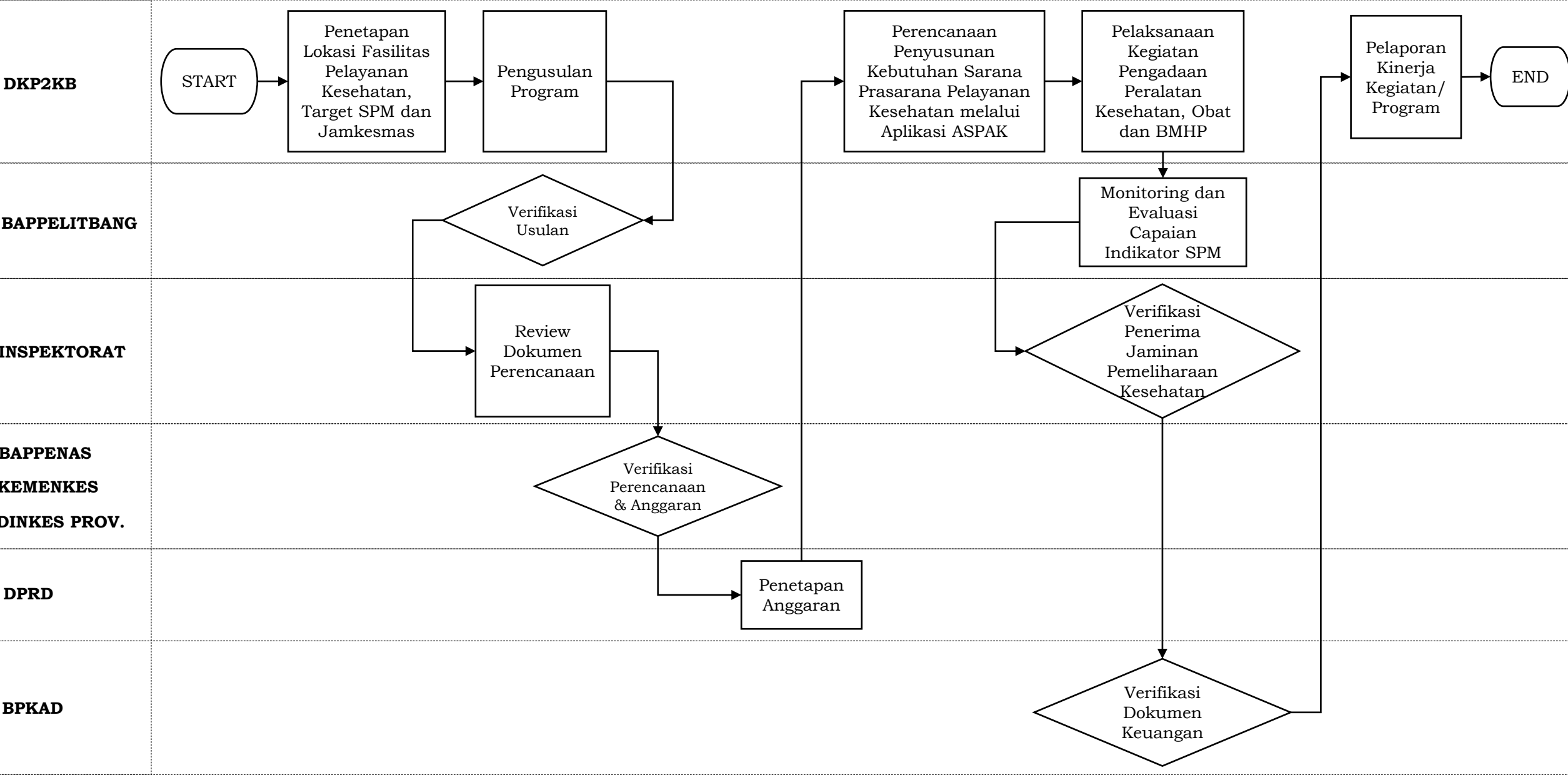
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.01. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

: TPI.01.02. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

: TPI.01.02.CFM.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



Peta Proses

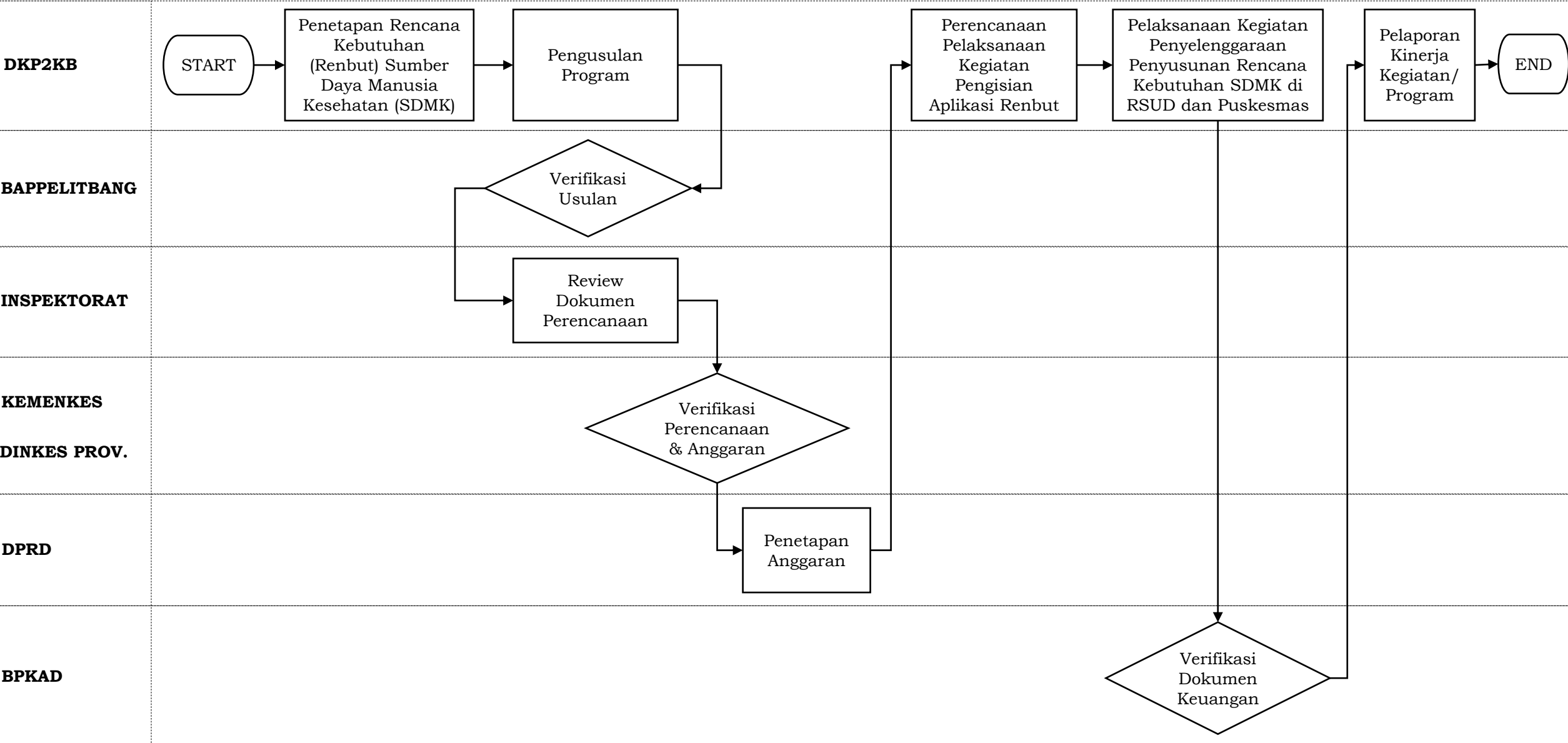
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.01. Peningkatan kualitas pembangunan manusia

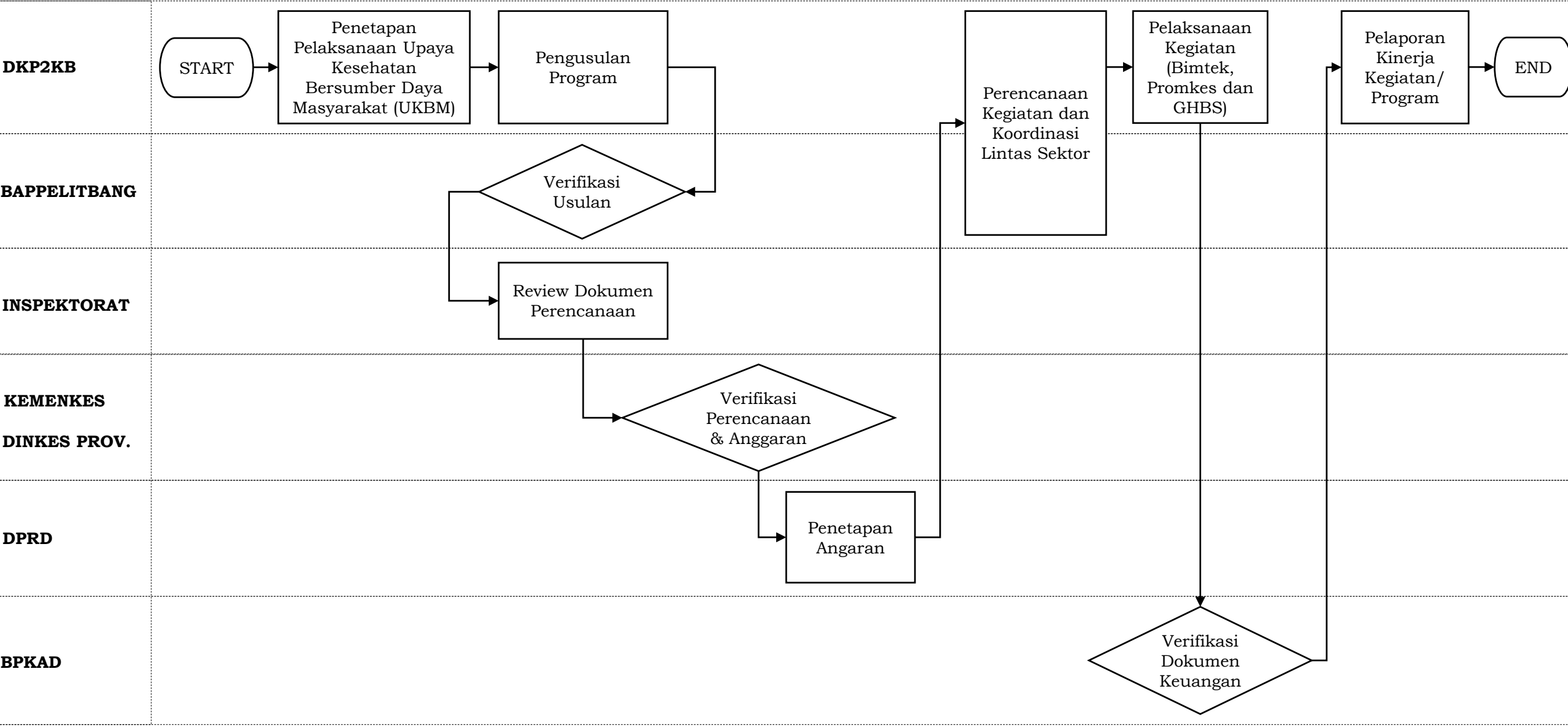
: TPI.01.02. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

: TPI.01.02.CFM.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.01. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
: TPI.01.02. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat
: TPI.01.02.CFM.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



Peta Proses

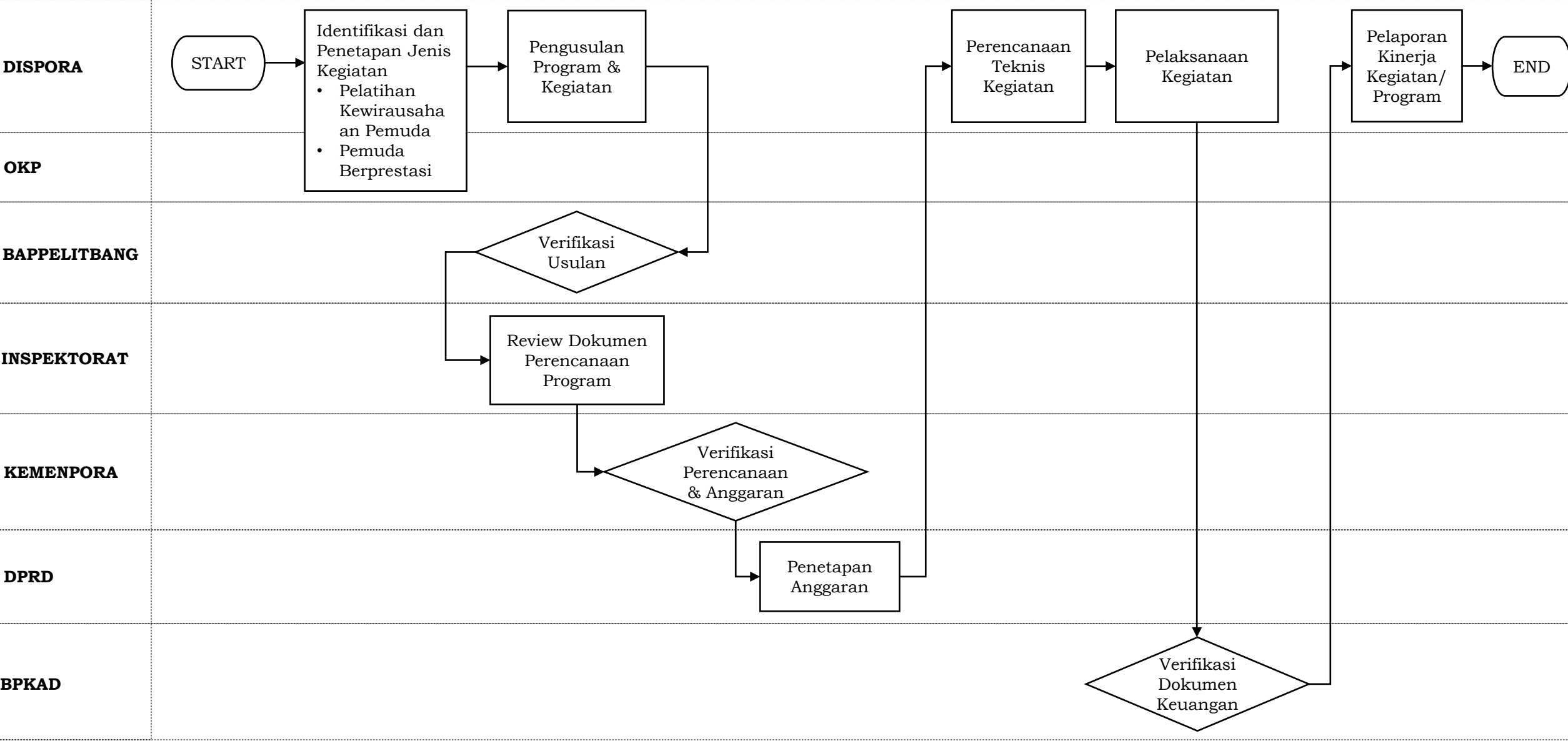
Sub Proses

Lintas Fungsi

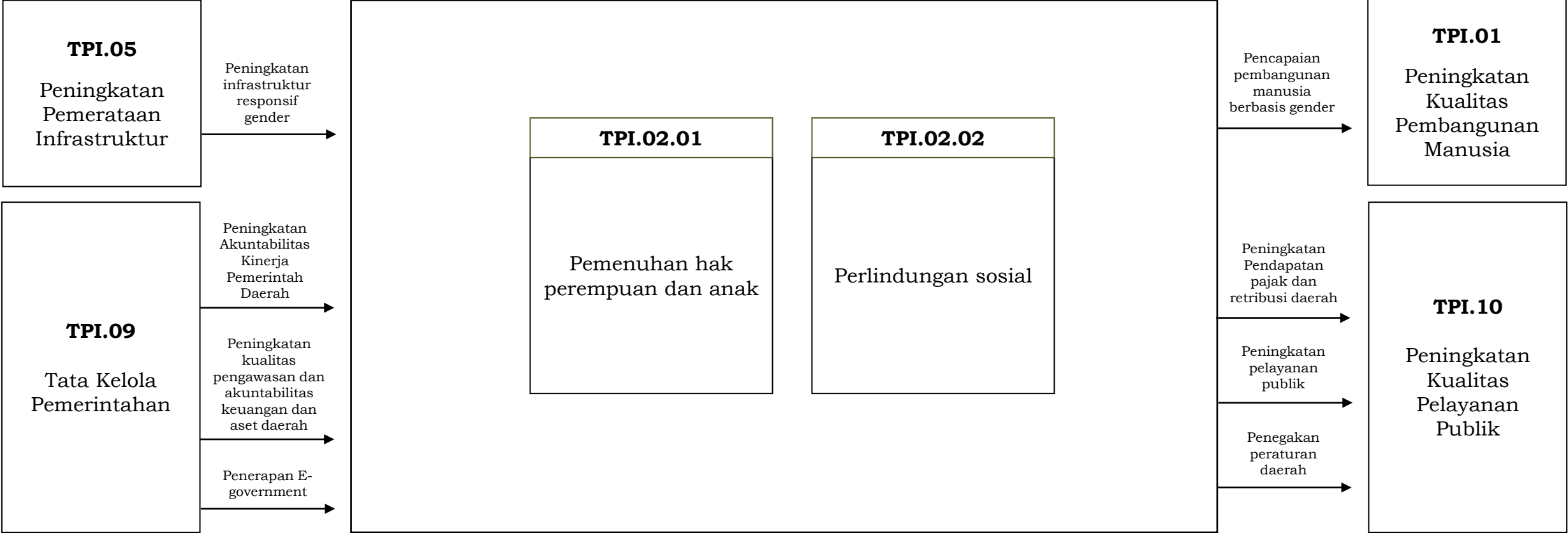
: TPI.01. Peningkatan kualitas pembangunan manusia

: TPI.01.03. Peningkatan prestasi pemuda

: TPI.01.03.CFM.04. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

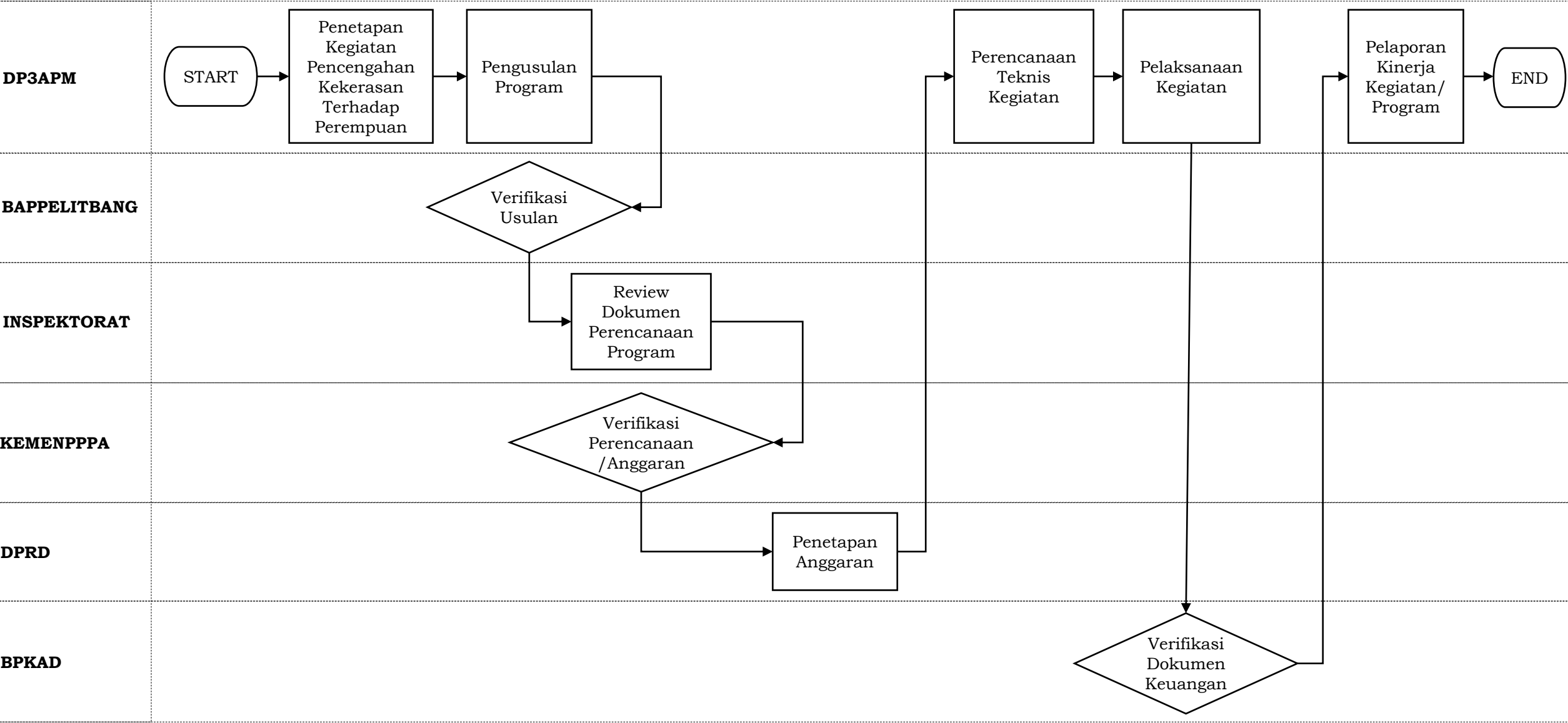


TPI.02
Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender



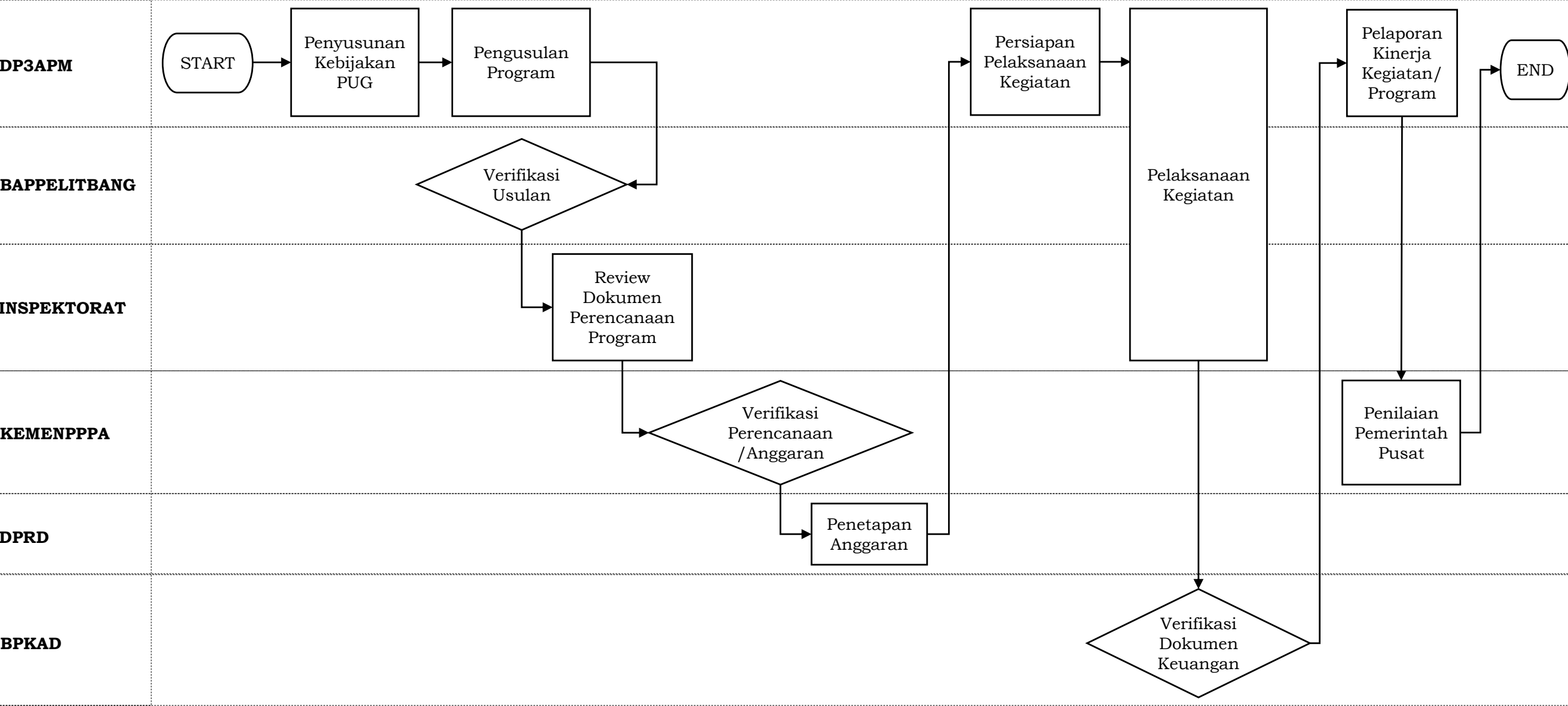
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
: TPI.02.01. Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Perlindungan Sosial
: TPI.02.01.CFM.01. Perlindungan Perempuan



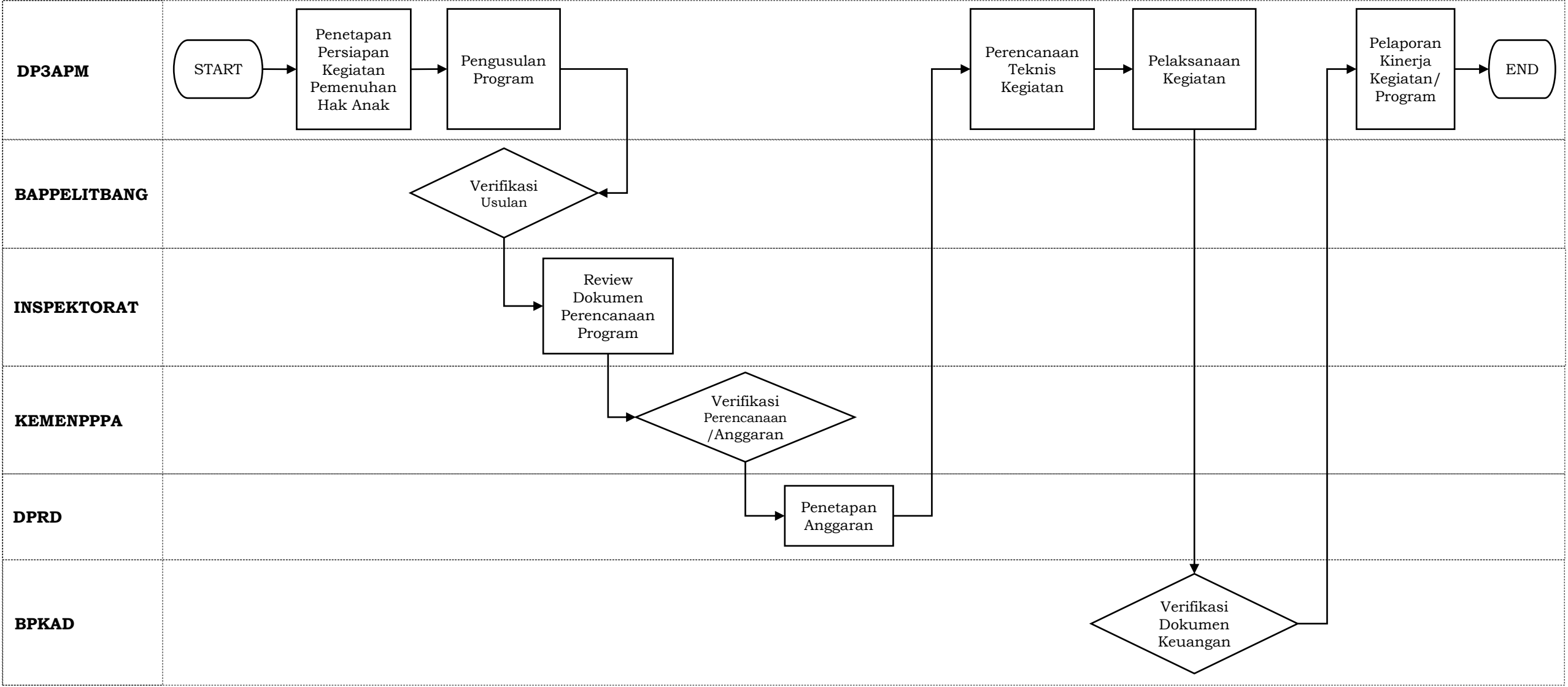
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
: TPI.02.01. Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Perlindungan Sosial
: TPI.02.01.CFM.02. Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

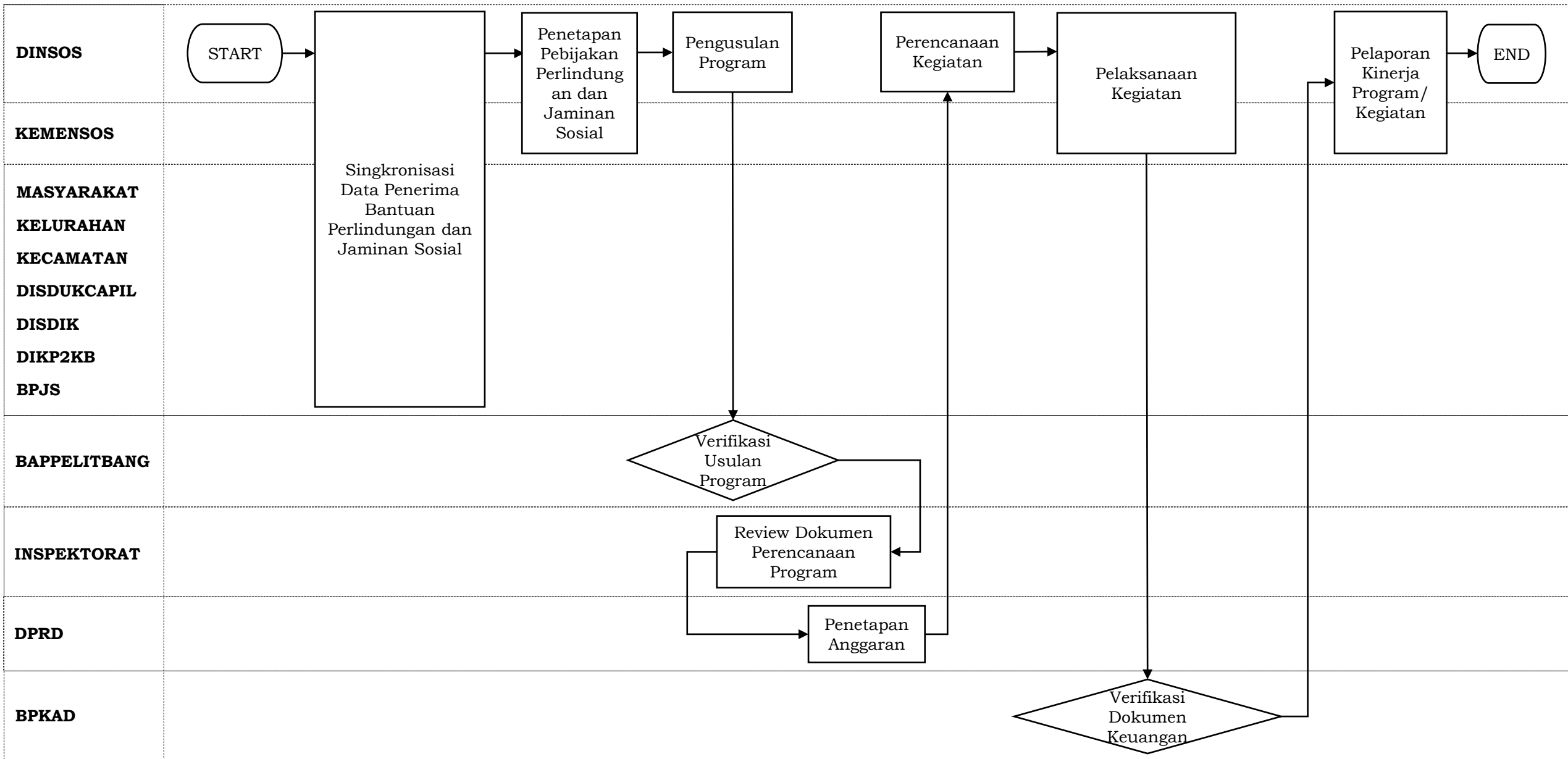


Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
: TPI.02.01. Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Perlindungan Sosial
: TPI.02.01.CFM.03. Program Pemenuhan Hak Anak

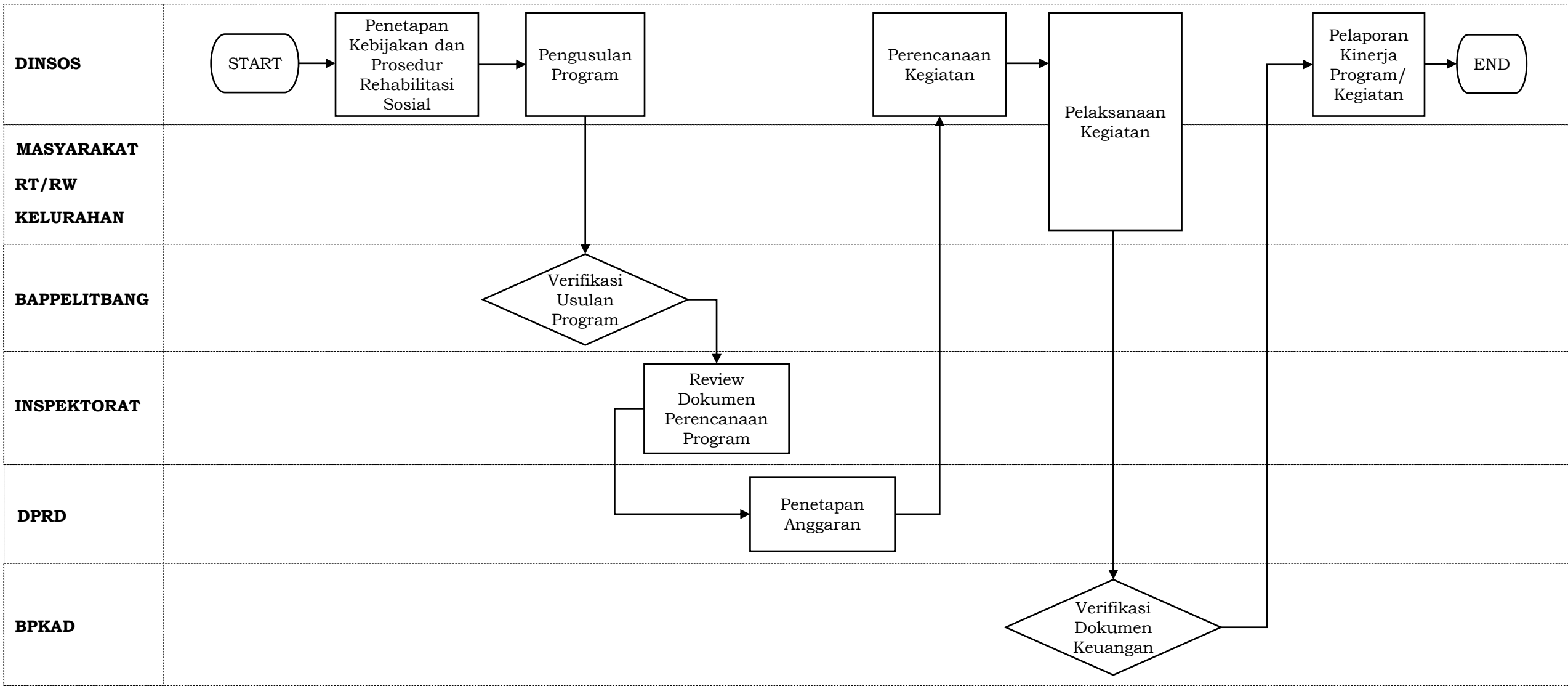


Peta Proses : TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
 Sub Proses : TPI.02.02. Perlindungan Sosial
 Lintas Fungsi : TPI.02.02.CFM.01. Perlindungan dan Jaminan Sosial

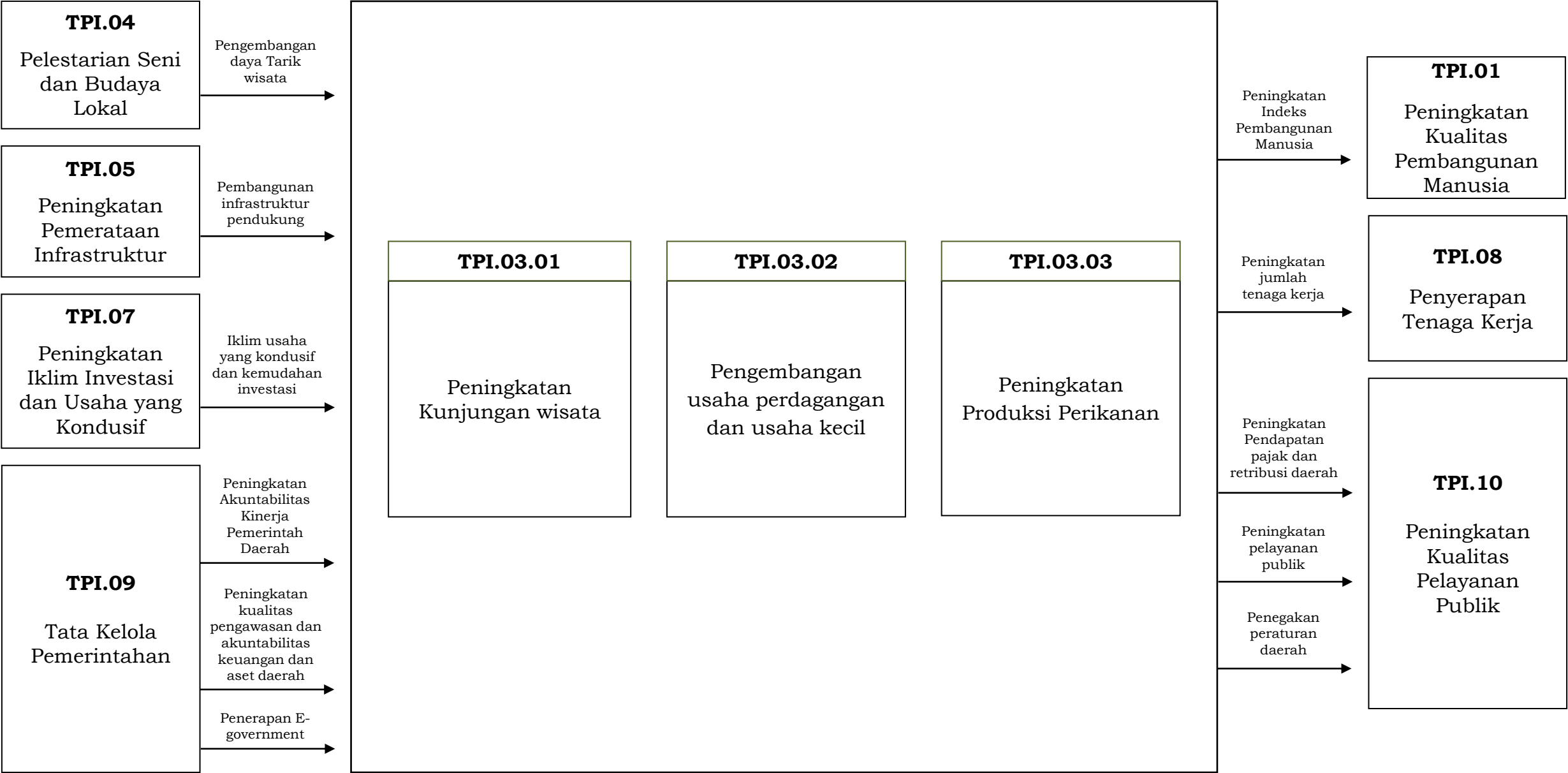


Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.02. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
: TPI.02.02. Perlindungan Sosial
: TPI.02.02.CFM.02. Rehabilitasi Sosial

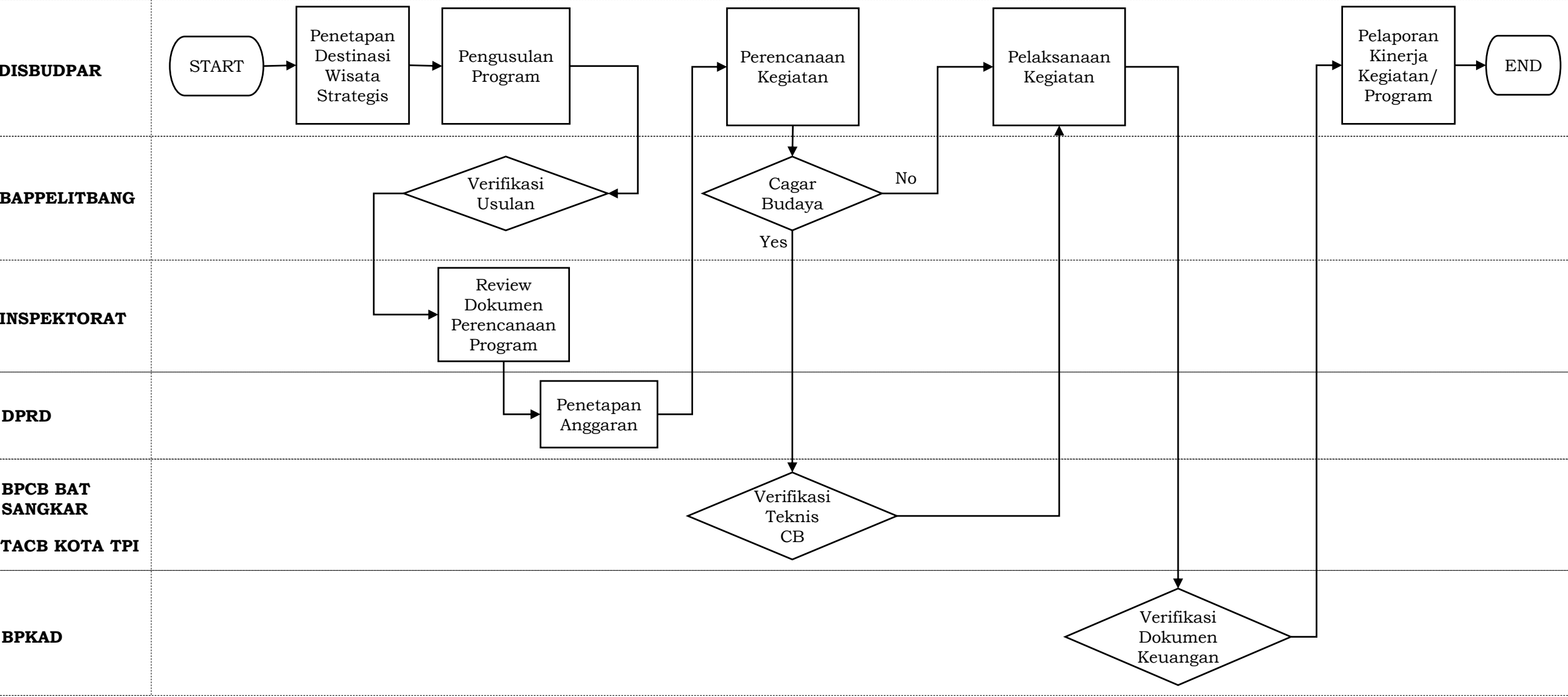


TPI.03
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

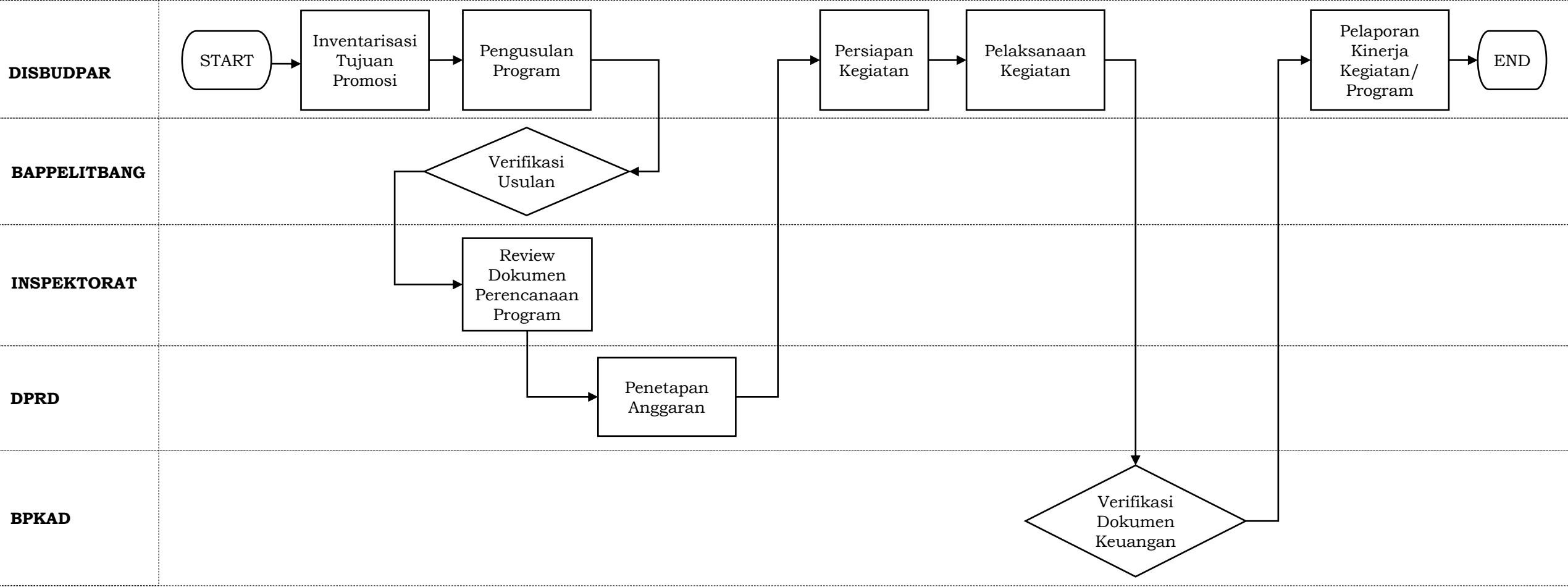


Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.01. Peningkatan Kunjungan wisata
: TPI.03.01.CFM.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

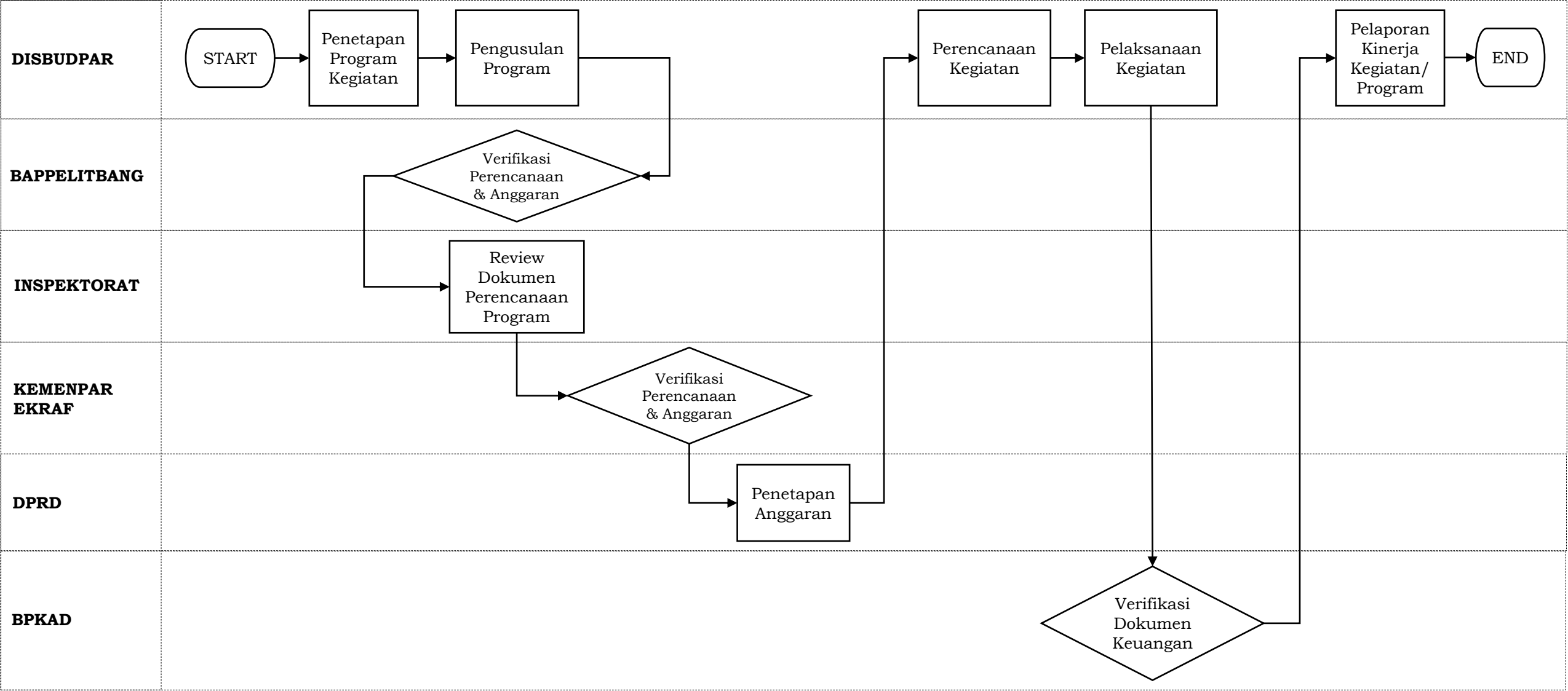


Peta Proses : TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Sub Proses : TPI.03.01. Peningkatan Kunjungan wisata
Lintas Fungsi : TPI.03.01.CFM.02. Pemasaran Pariwisata



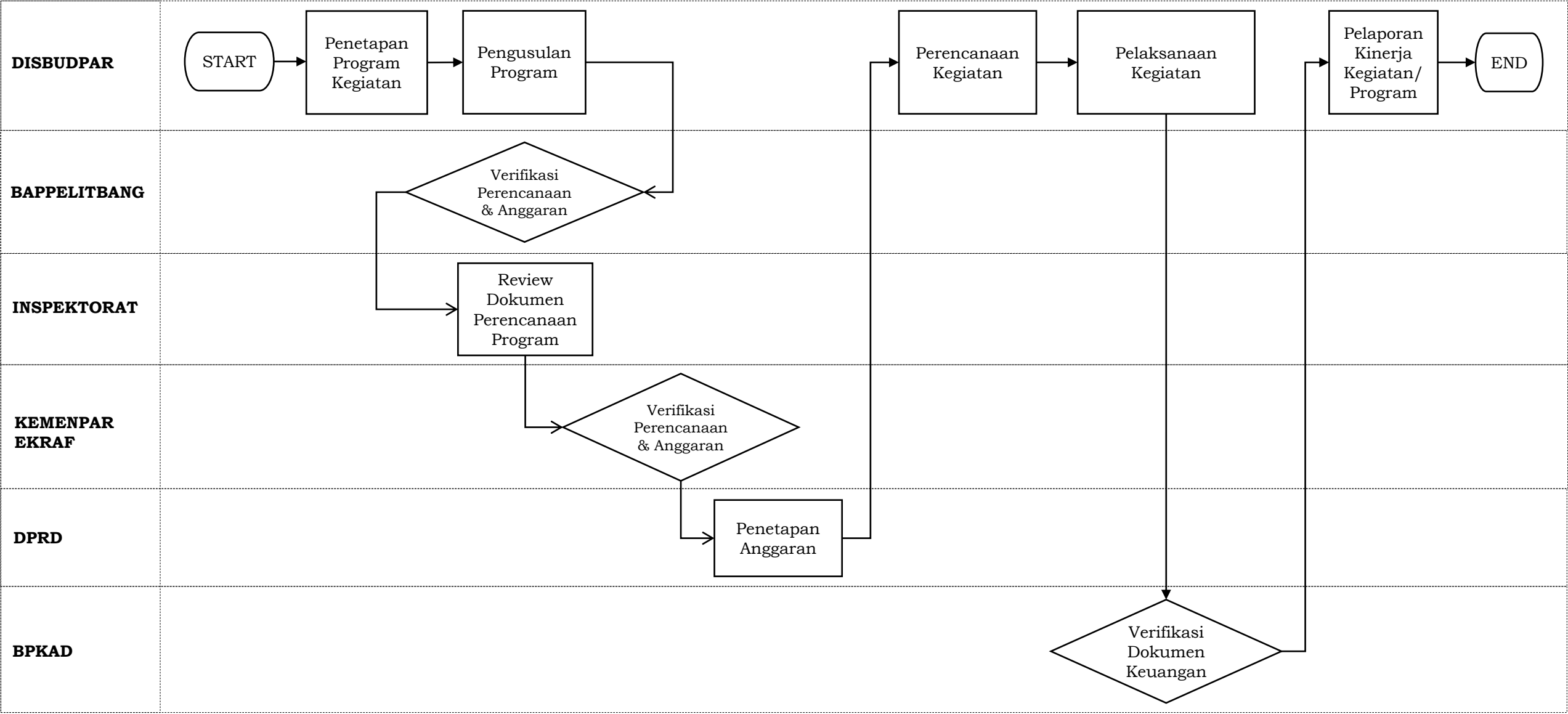
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.01. Peningkatan Kunjungan wisata
: TPI.03.01.CFM.03. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



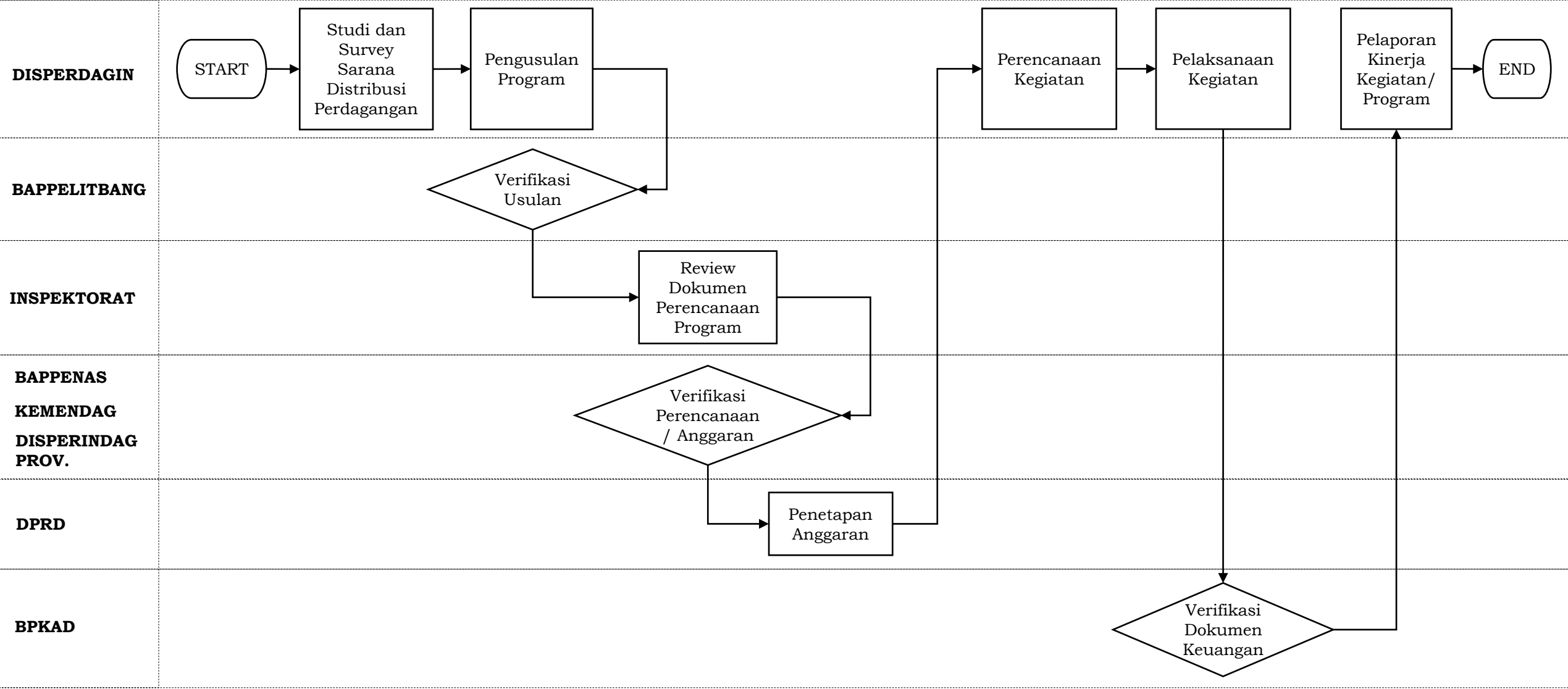
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.01. Peningkatan Kunjungan Wisata
: TPI.03.01.CFM.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.01. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Peta Proses

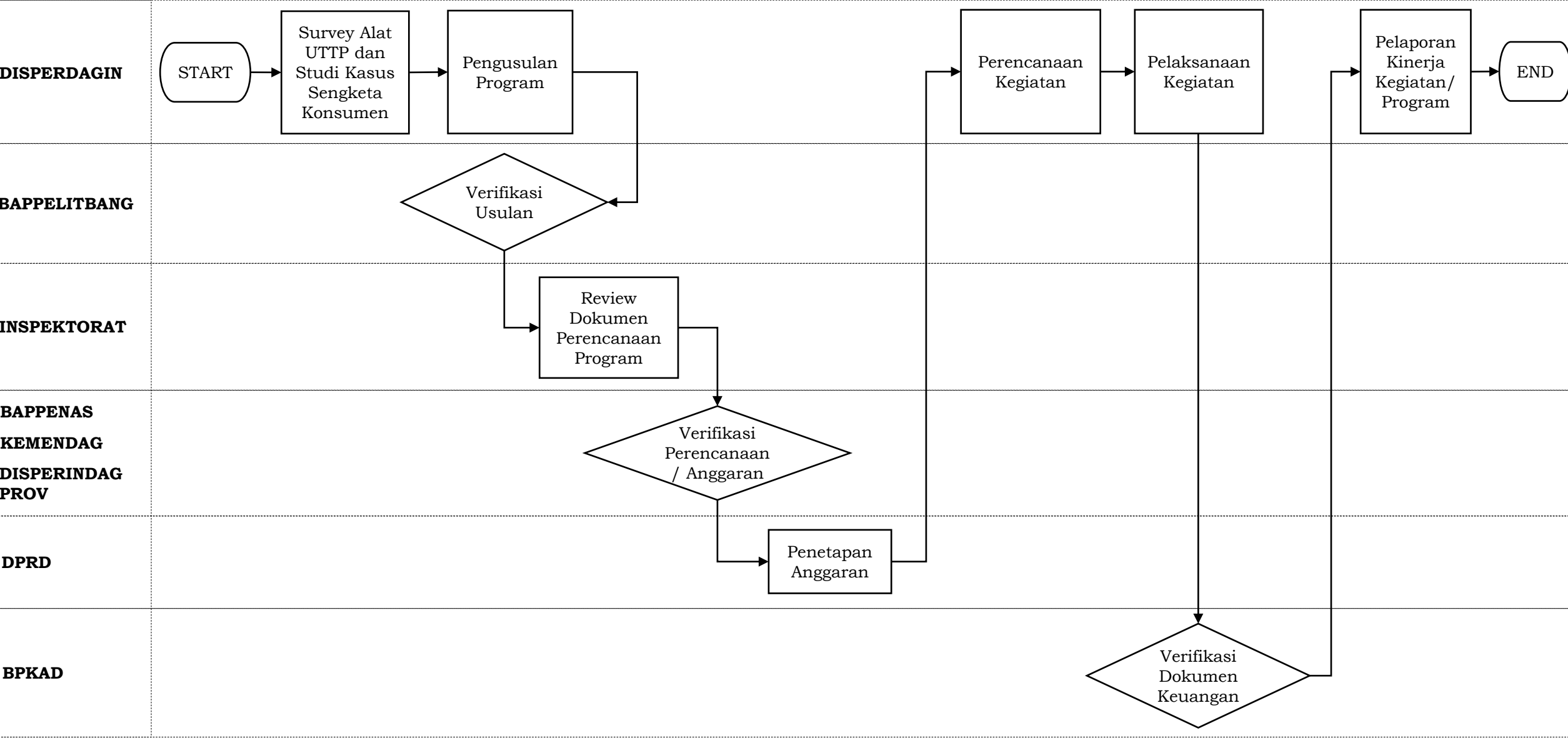
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

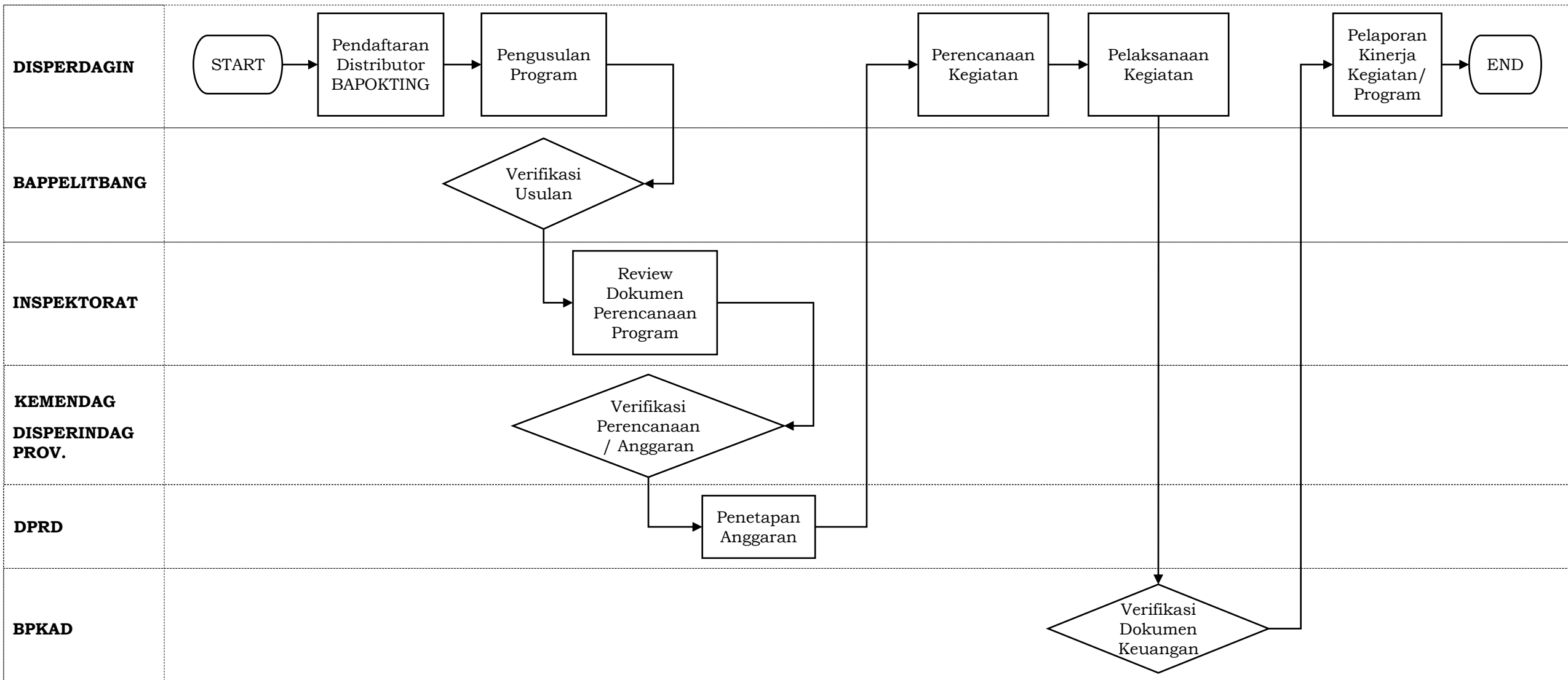
: TPI.03.02. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil

: TPI.03.02.CFM.02. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.03. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Peta Proses

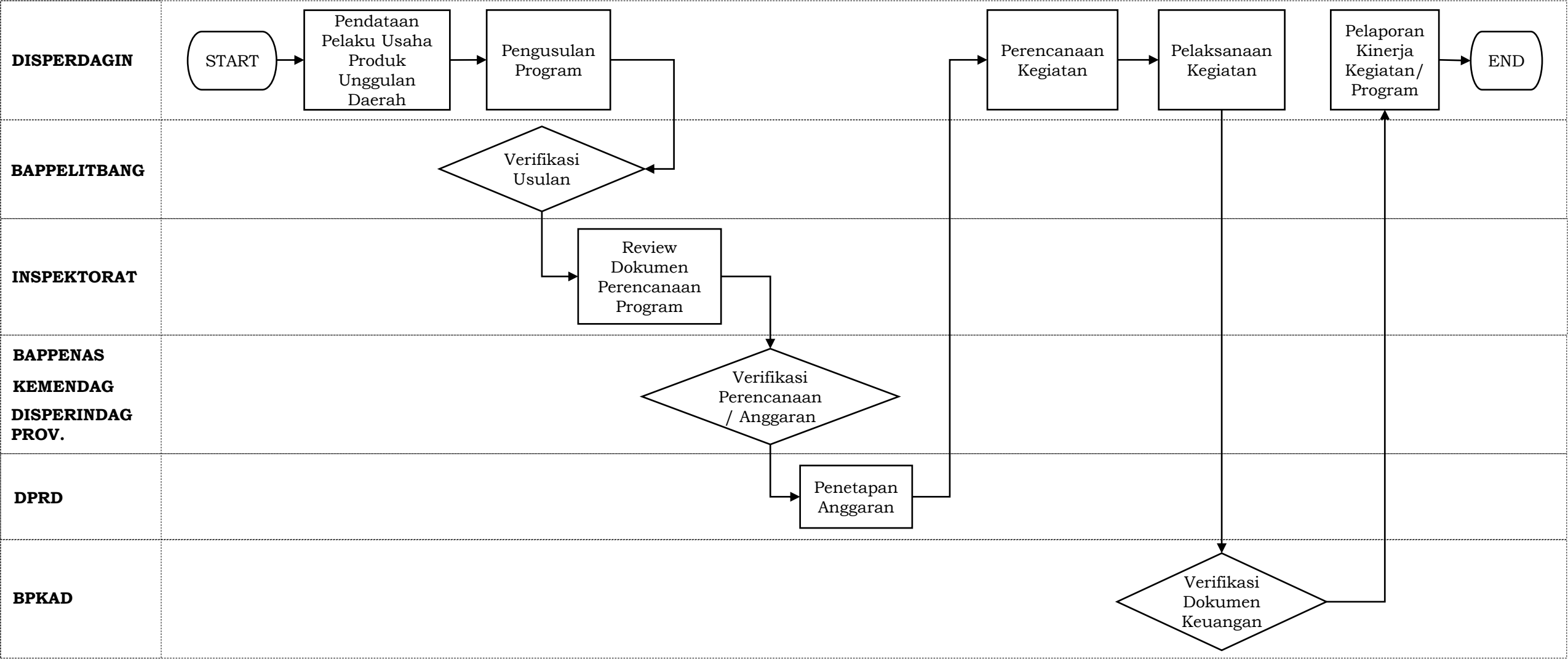
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

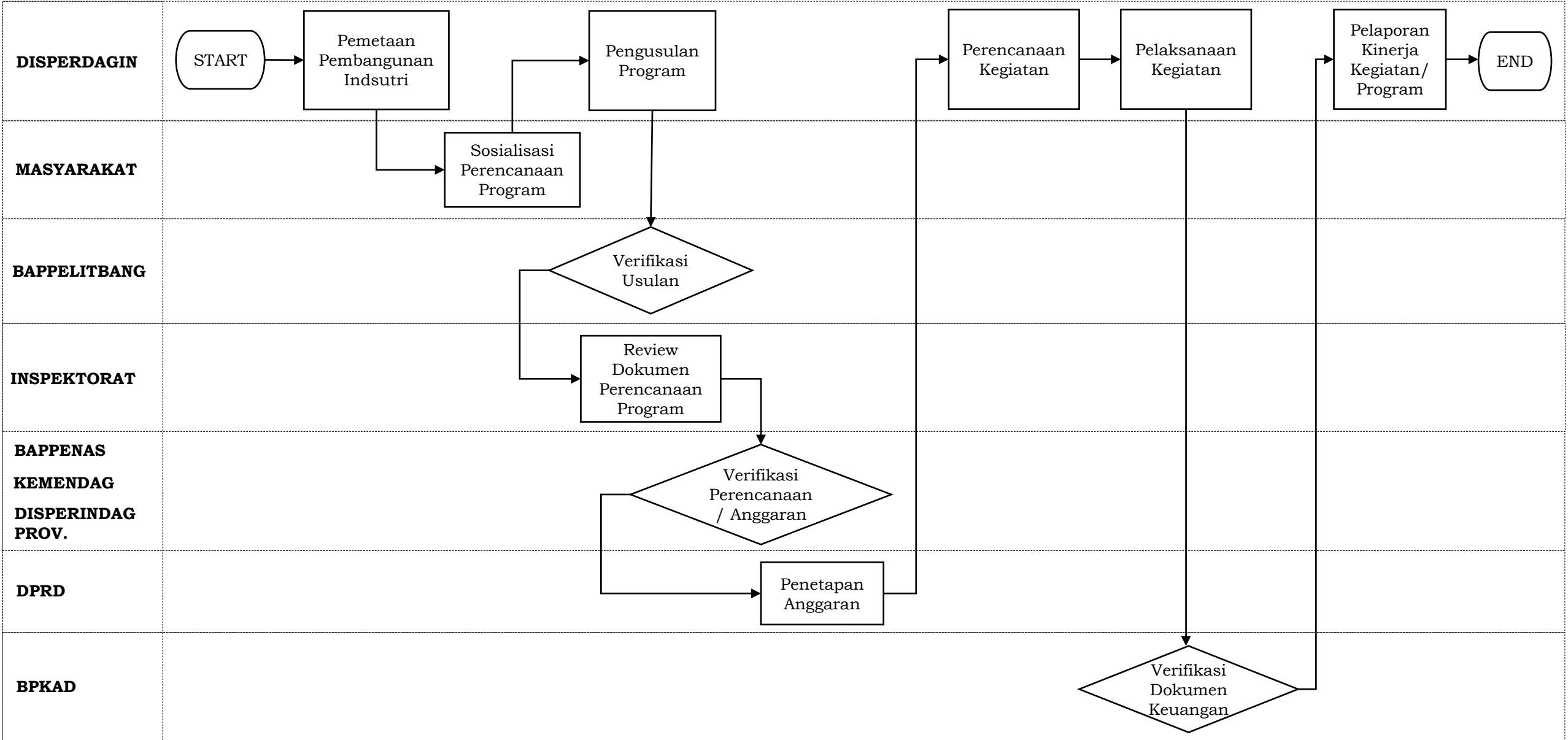
: TPI.03.02. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil

: TPI.03.02.CFM.04. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



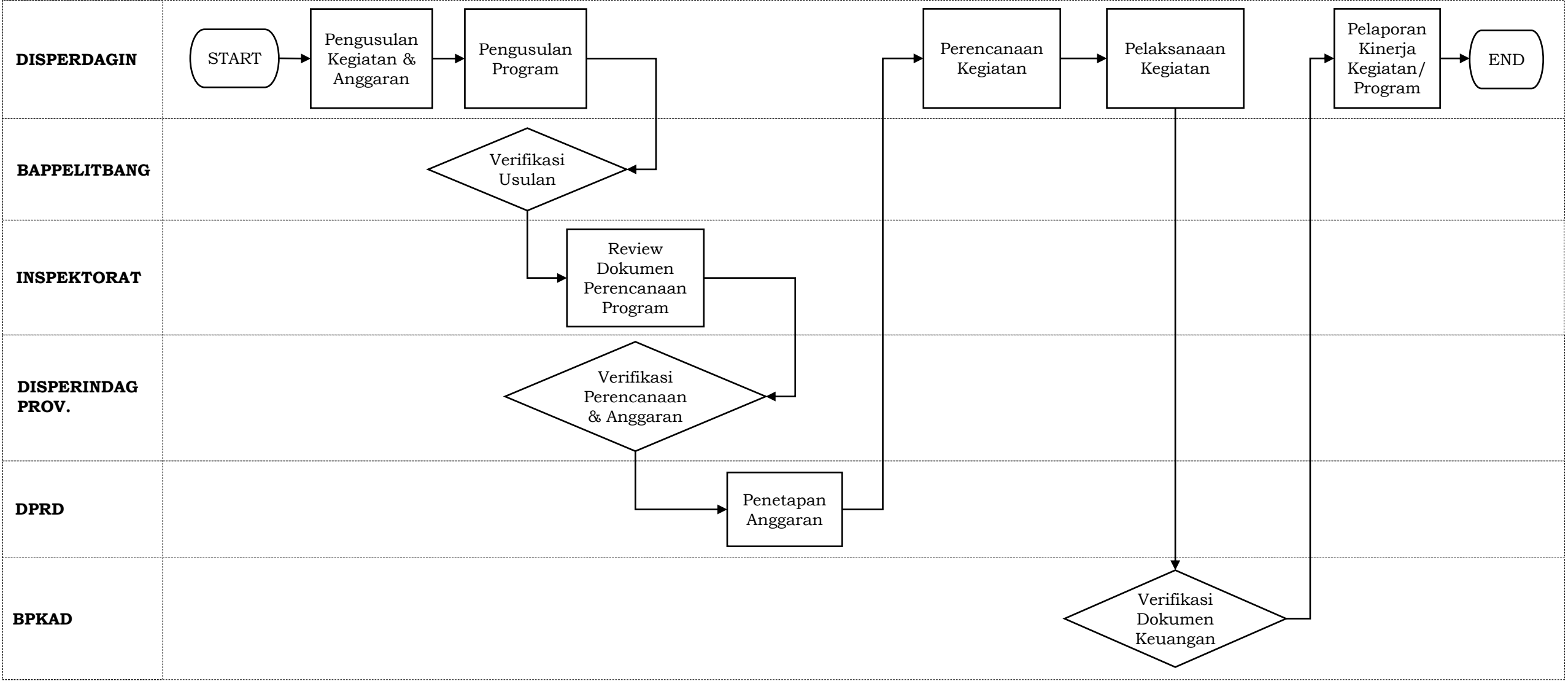
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Peningkatan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.05. Perencanaan dan Pembangunan Industri



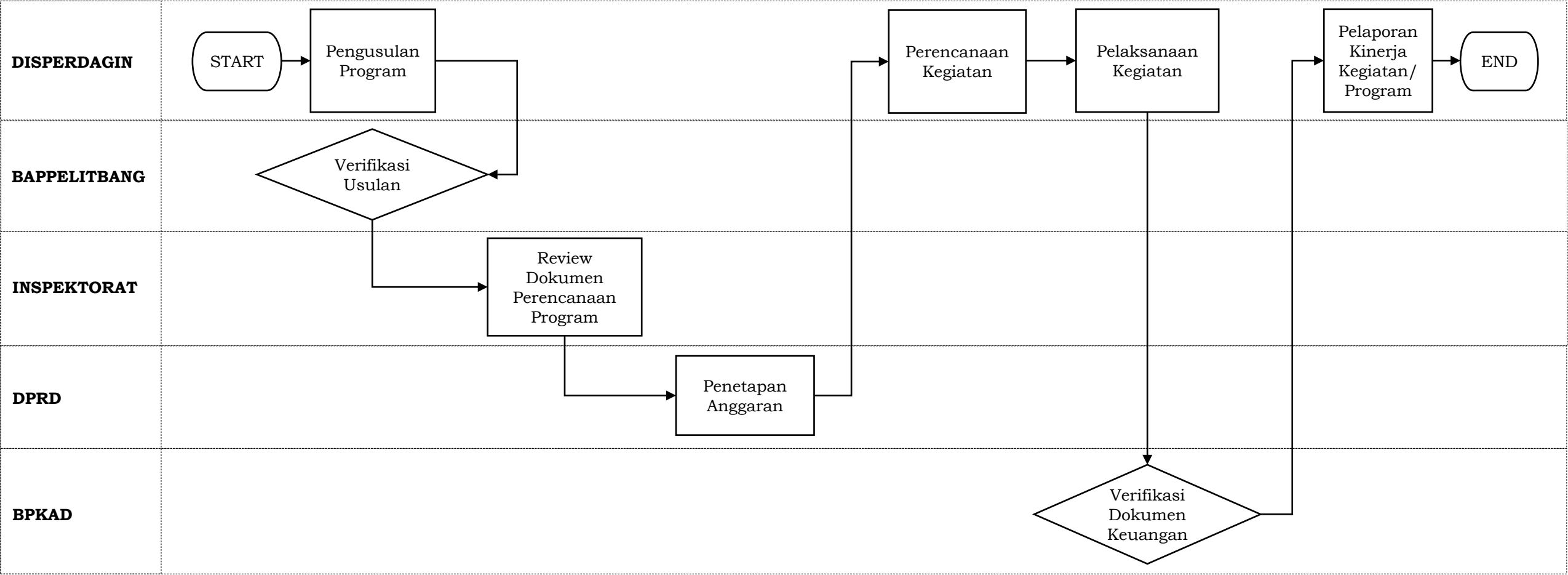
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.06. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



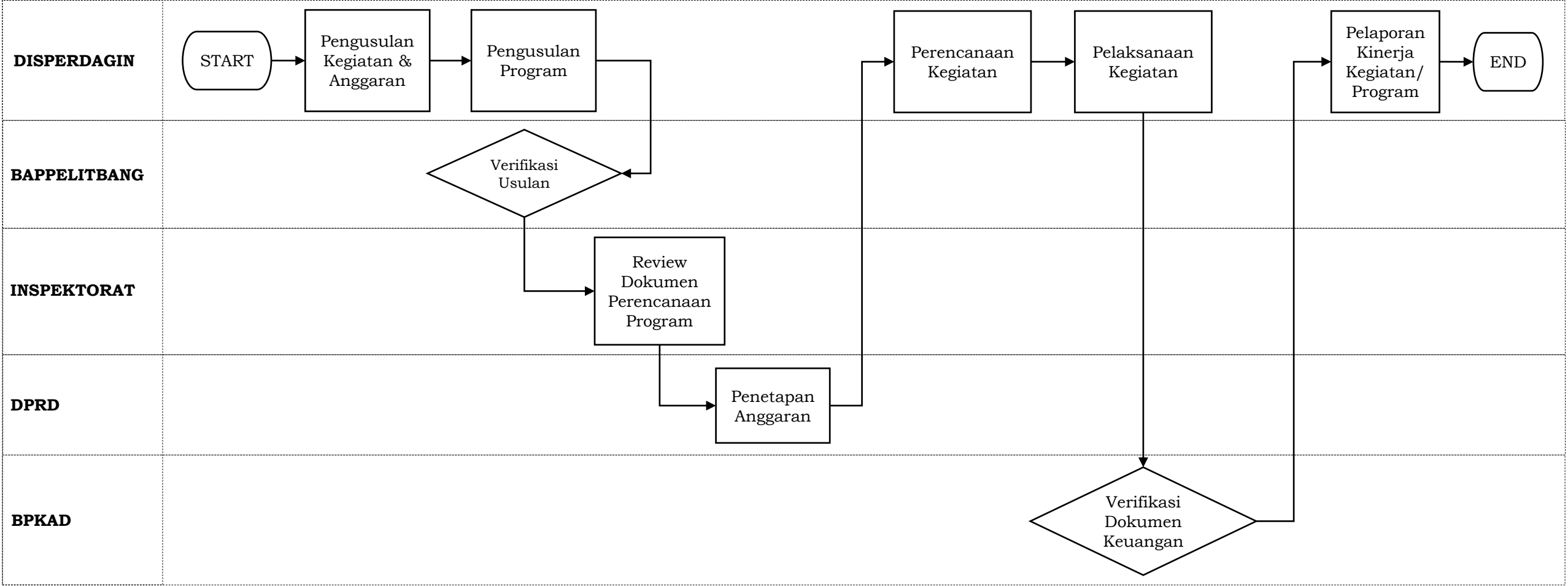
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.07. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



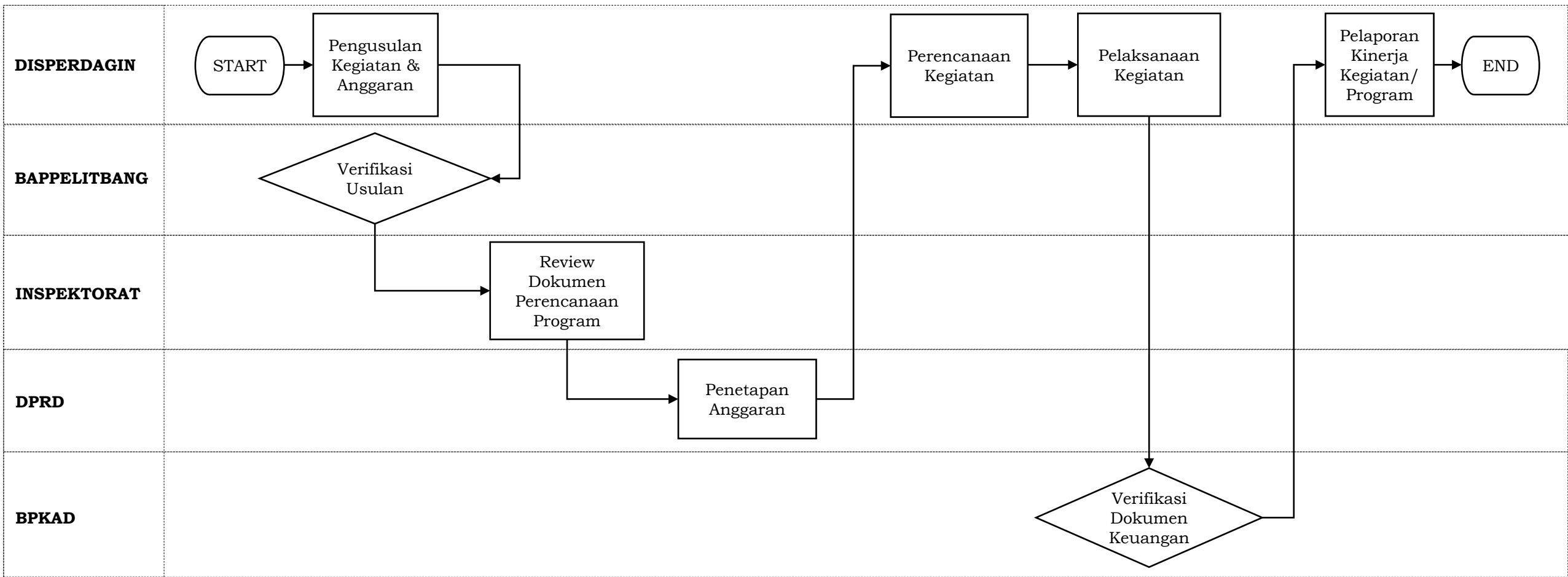
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.08. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



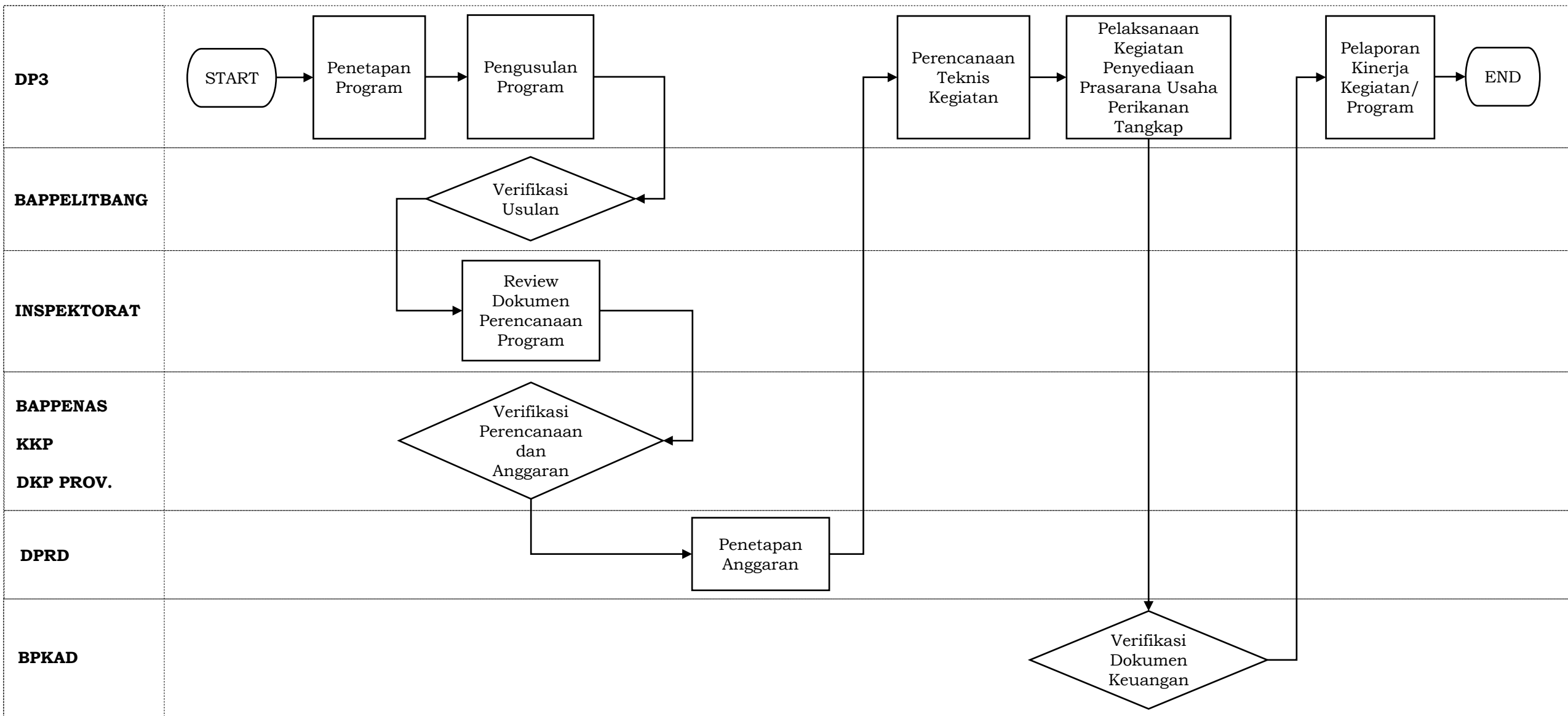
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.02. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil
: TPI.03.02.CFM.09. Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



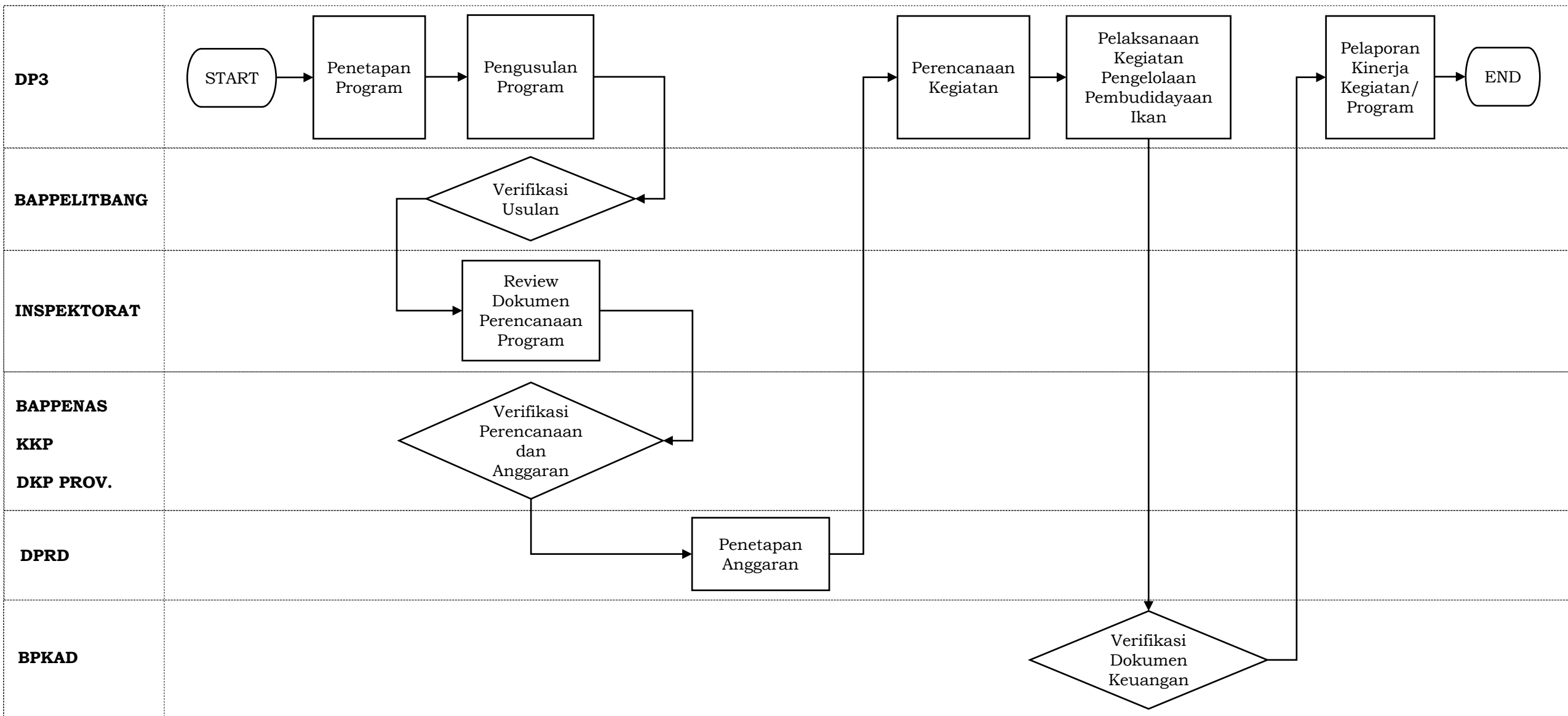
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

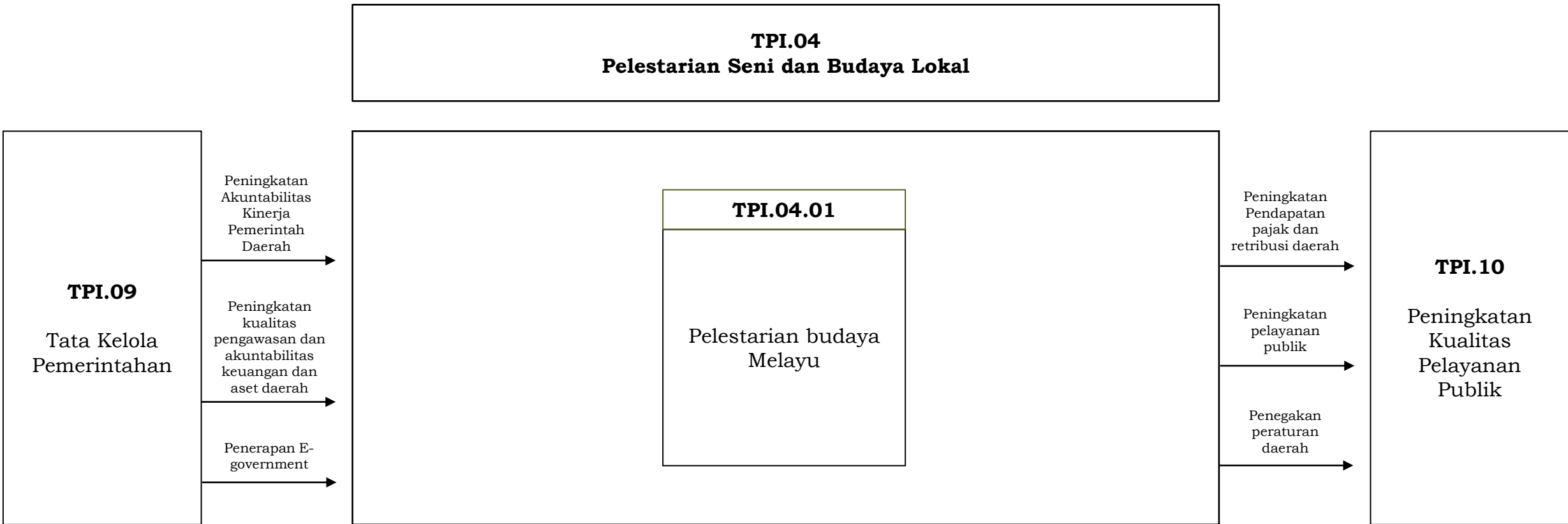
: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.03. Peningkatan Produksi Perikanan
: TPI.03.03.CFM.01. Pengelolaan Perikanan Tangkap



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

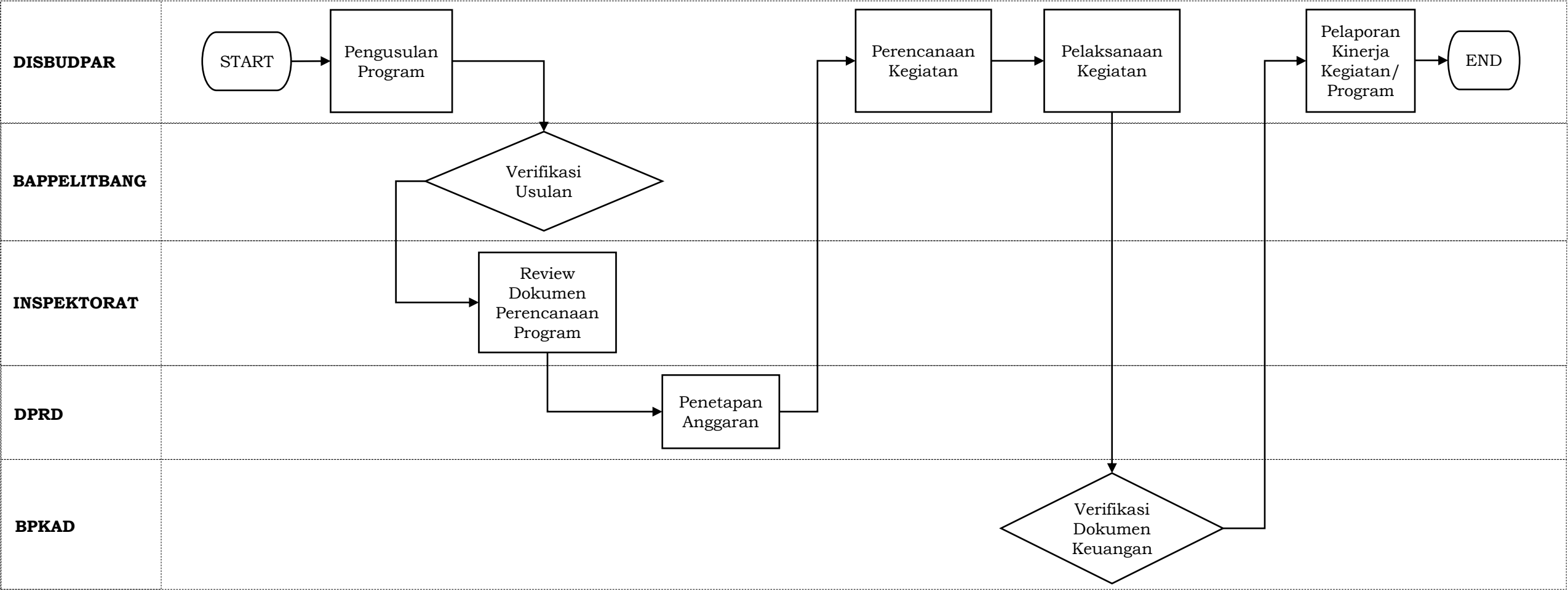
: TPI.03. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
: TPI.03.03. Peningkatan Produksi Perikanan
: TPI.03.03.CFM.02.Pengelolaan Perikanan Budidaya





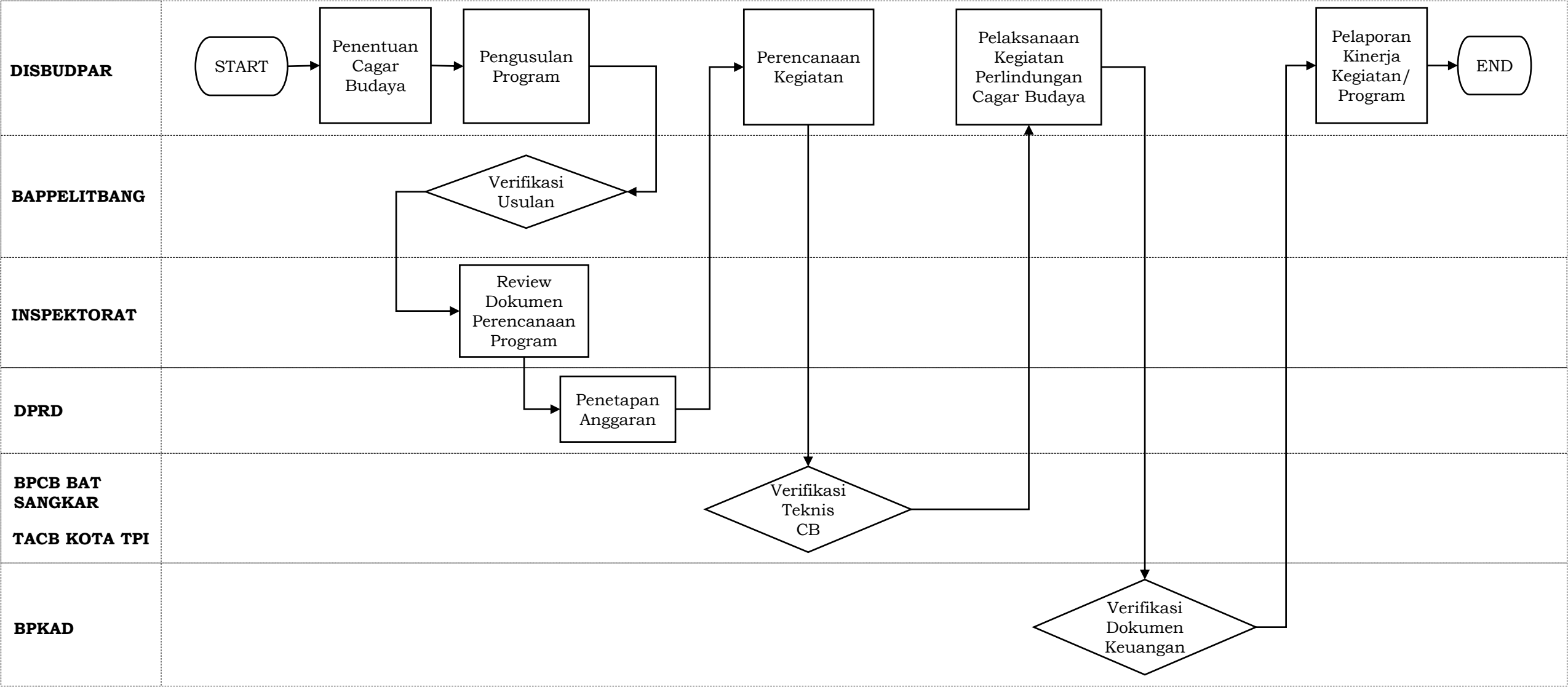
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

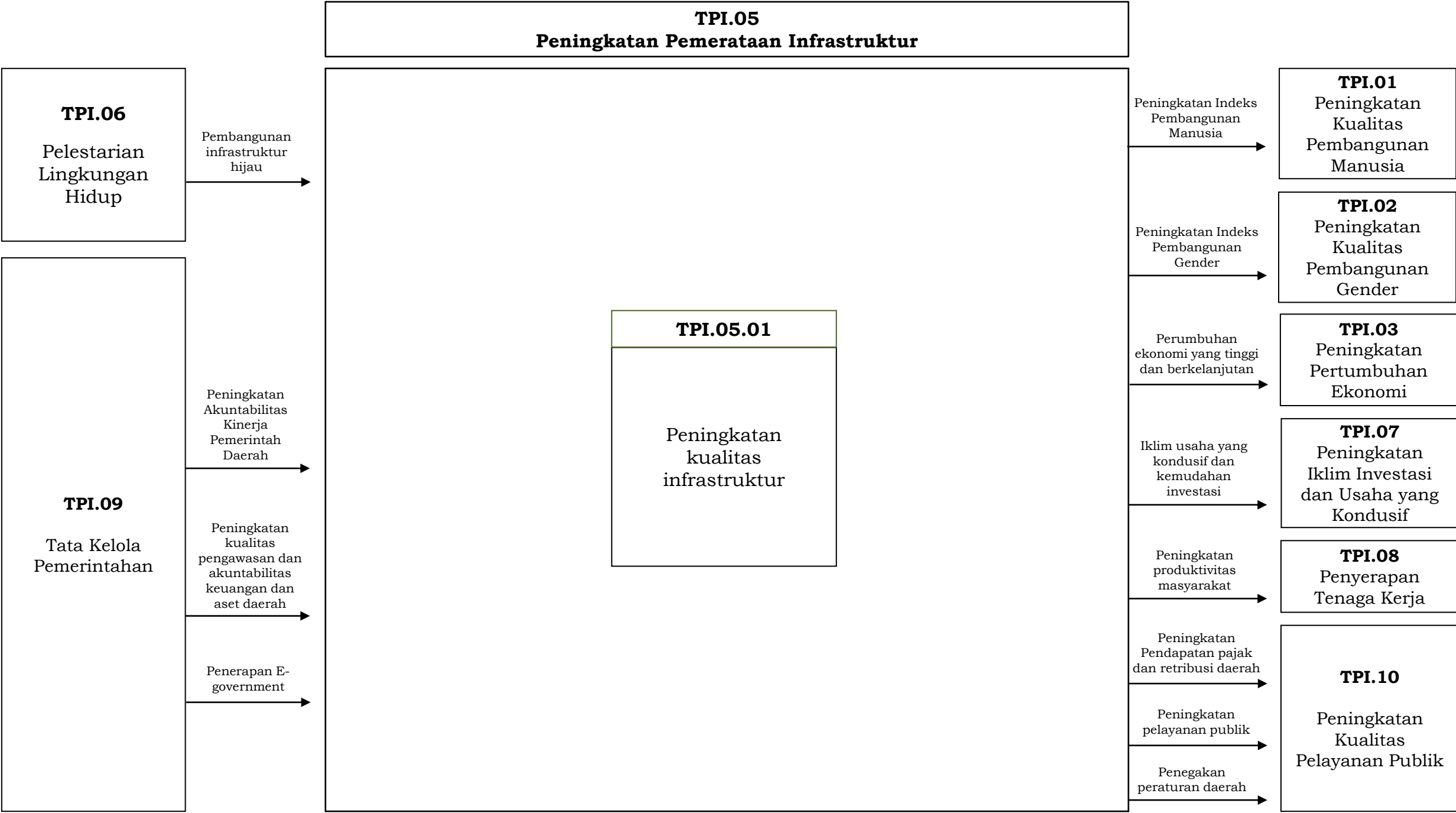
: TPI.04. Pelestarian Seni dan Budaya
: TPI.04.01. Peningkatan Kelestarian Budaya Melayu
: TPI.04.01.CFM.01. Pengembangan Kebudayaan



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.04. Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal
: TPI.04.01. Peningkatan Kelestarian Budaya Melayu
: TPI.04.01.CFM.02. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya





Peta Proses

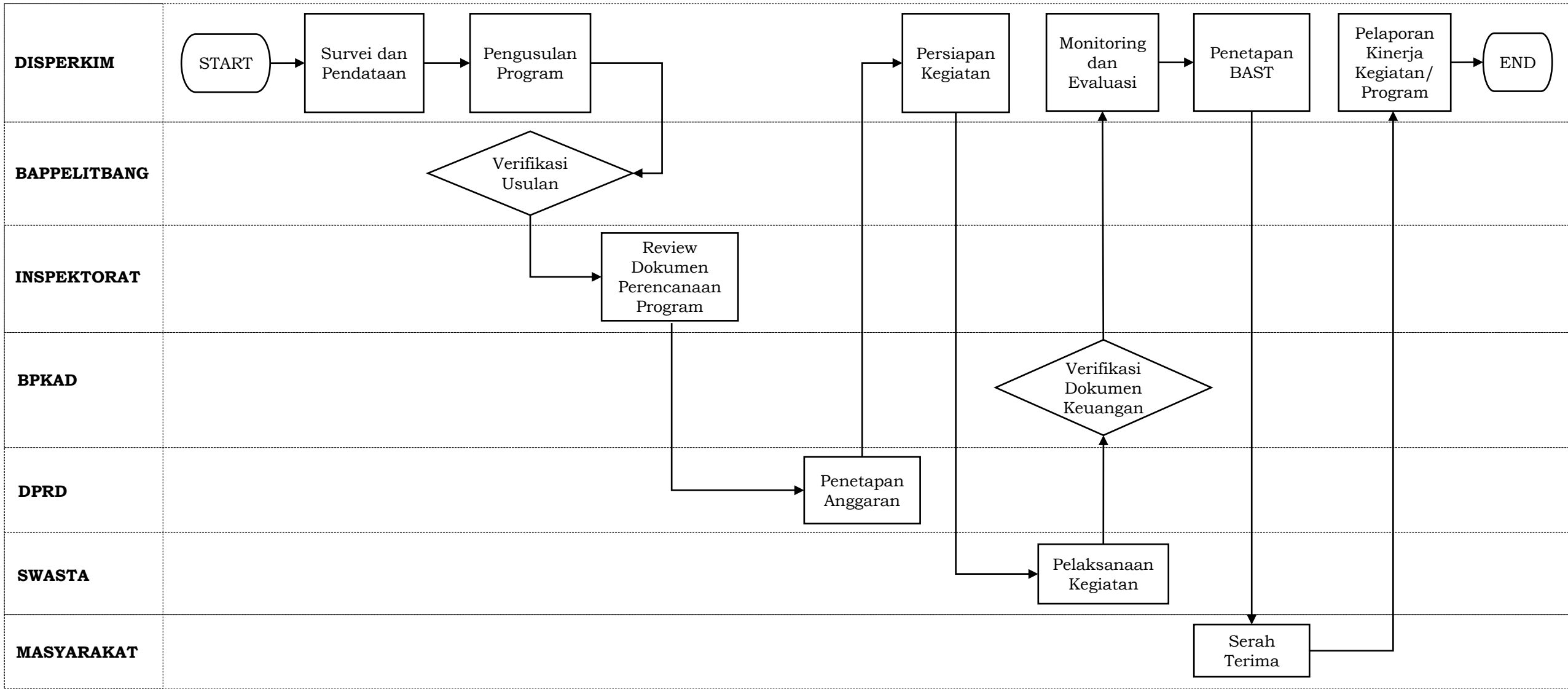
Sub Proses

Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur

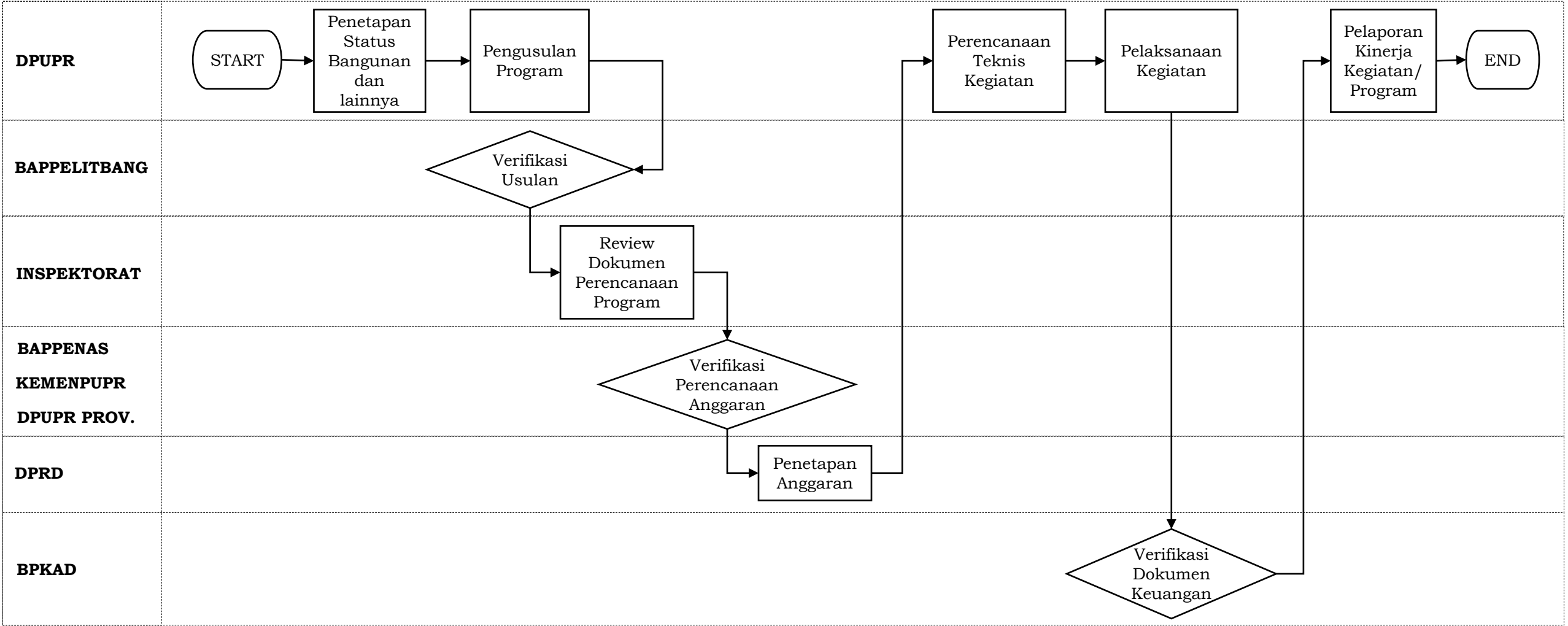
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

: TPI.05.01.CFM.01. Pengembangan Perumahan



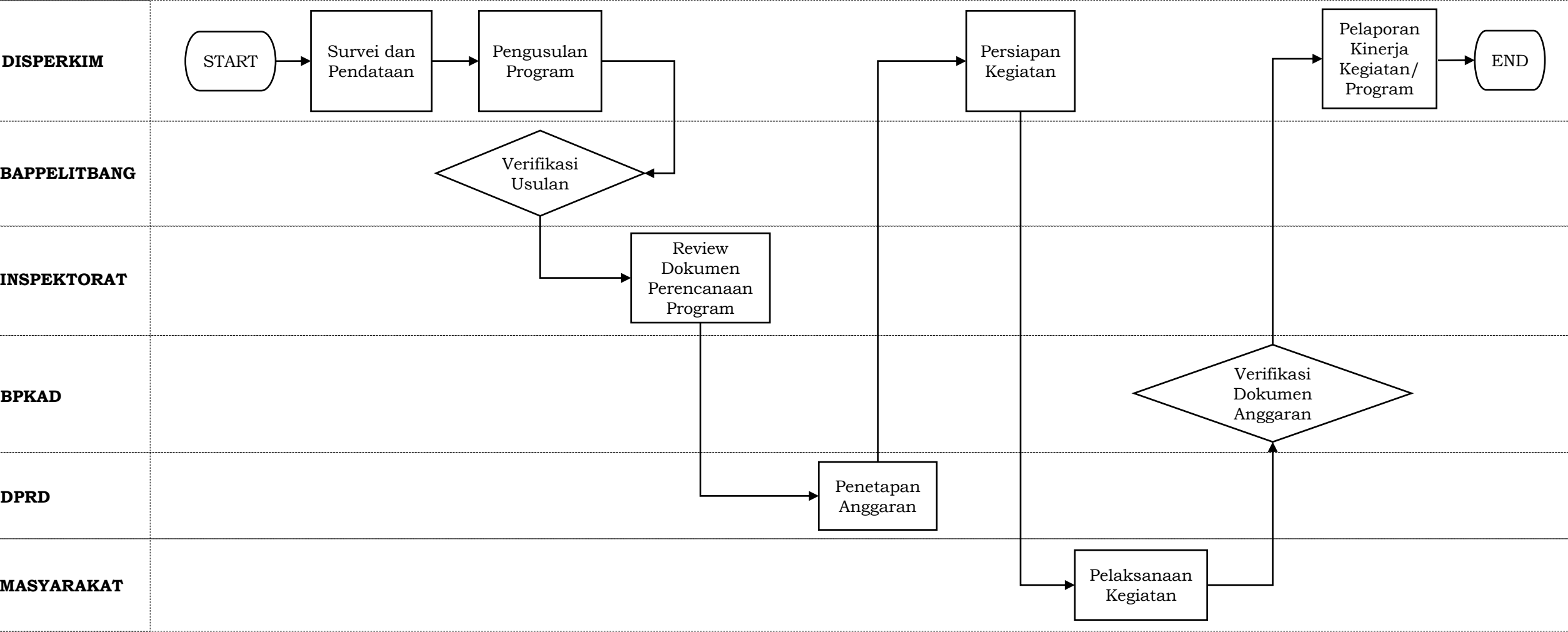
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.02. Penataan Bangunan dan Lingkungannya



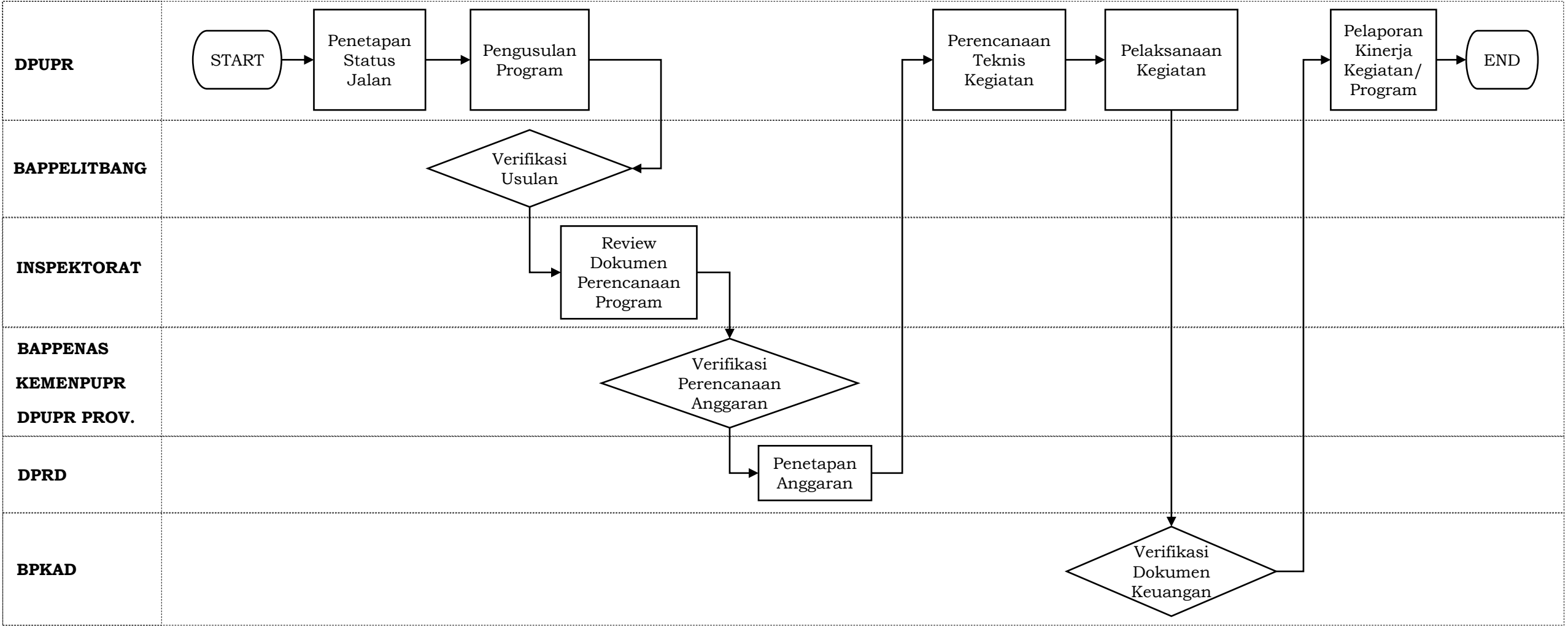
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.03. Pengembangan Permukiman



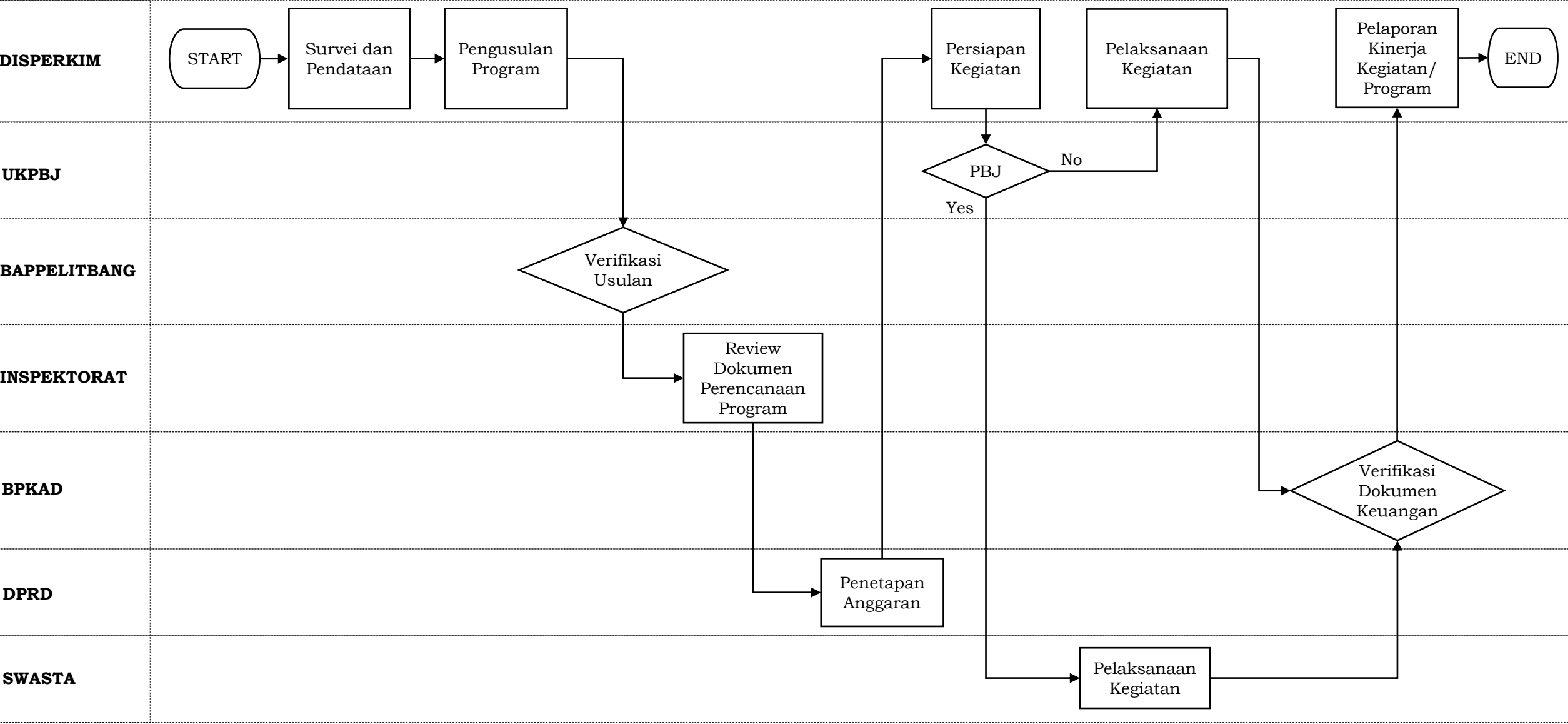
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.04. Penyelenggaraan Jalan



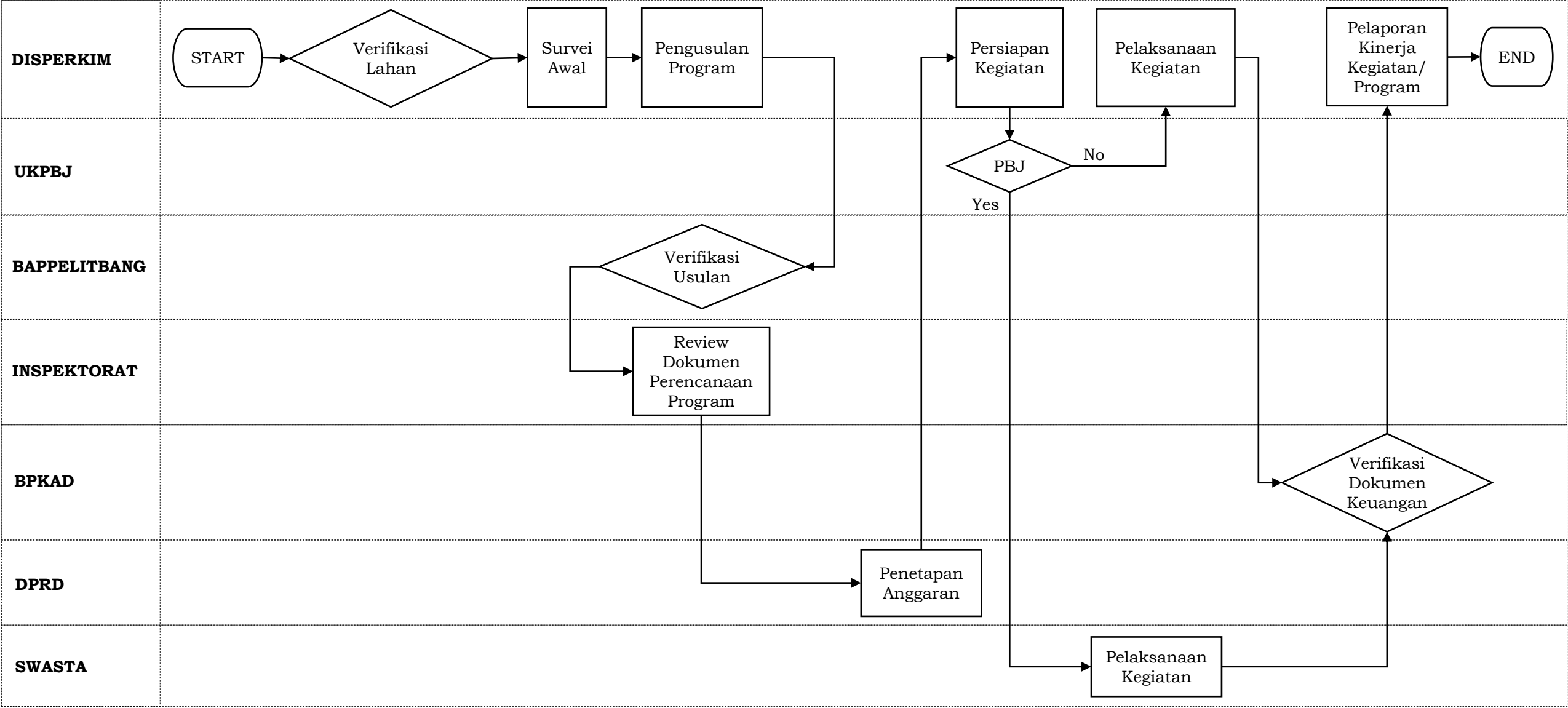
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.05. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



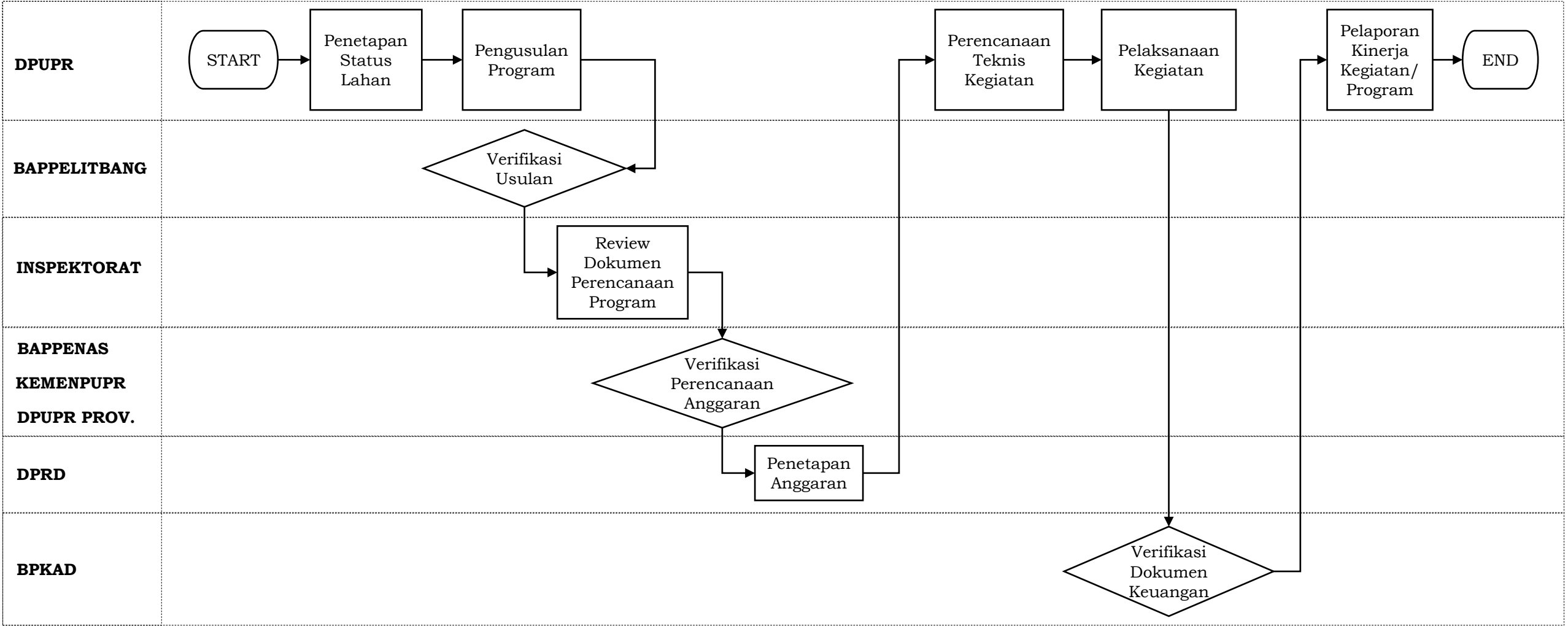
Peta Prose
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.06. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



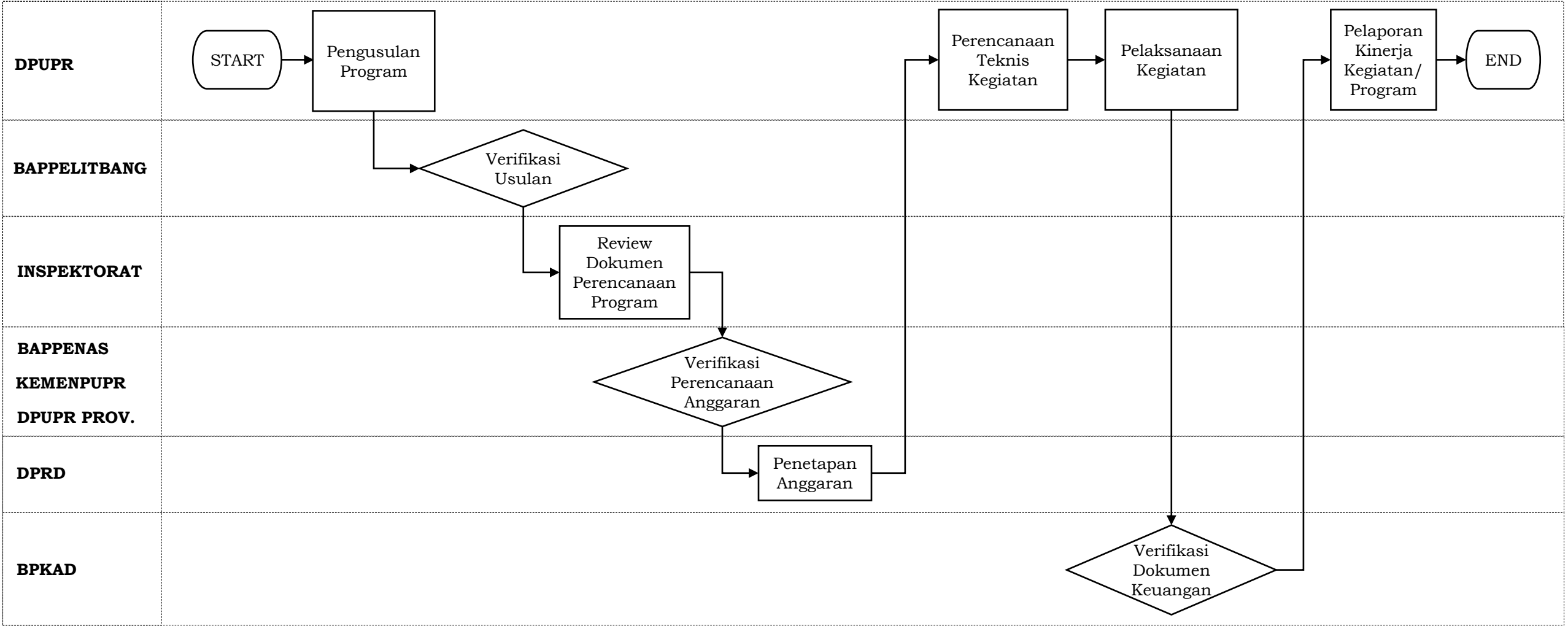
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.07. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

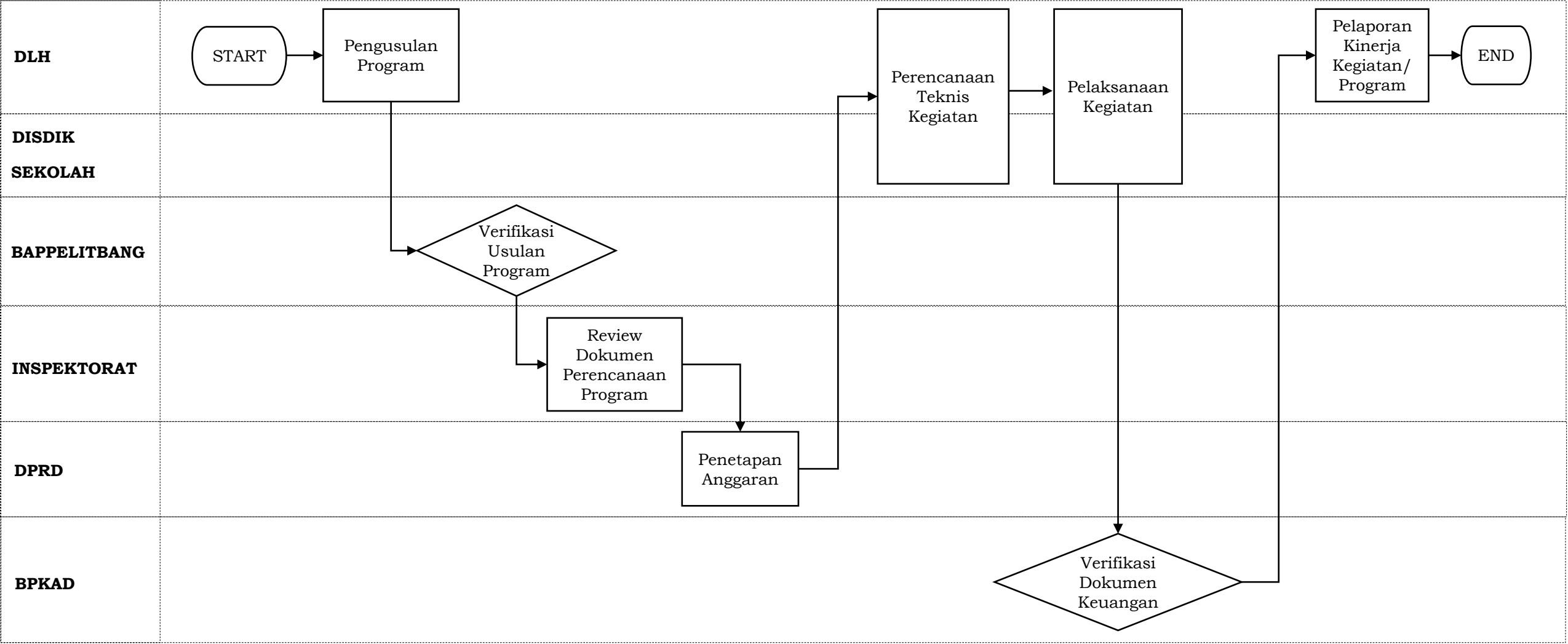
: TPI.05. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur
: TPI.05.01. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
: TPI.05.01.CFM.08. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum





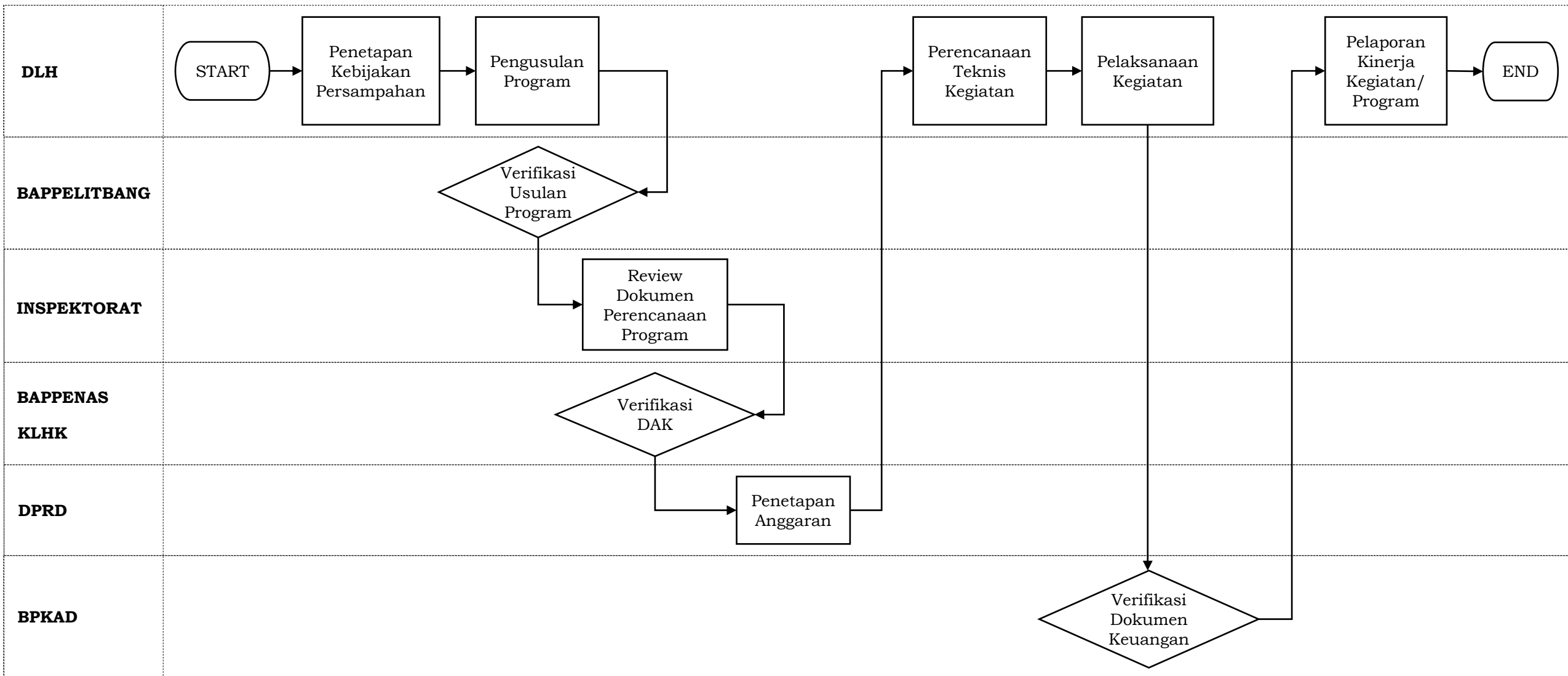
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.06. Pelestarian Lingkungan Hidup
: TPI.06. 01. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
: TPI.06.01.CFM.01. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



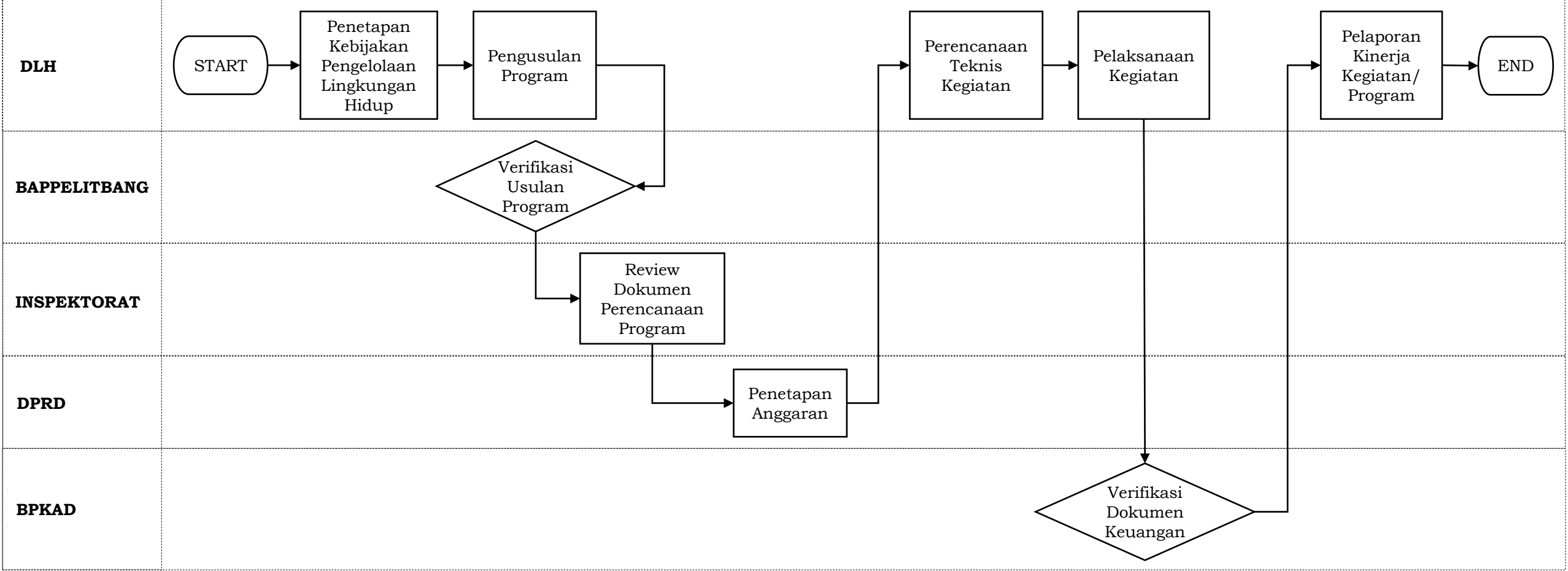
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

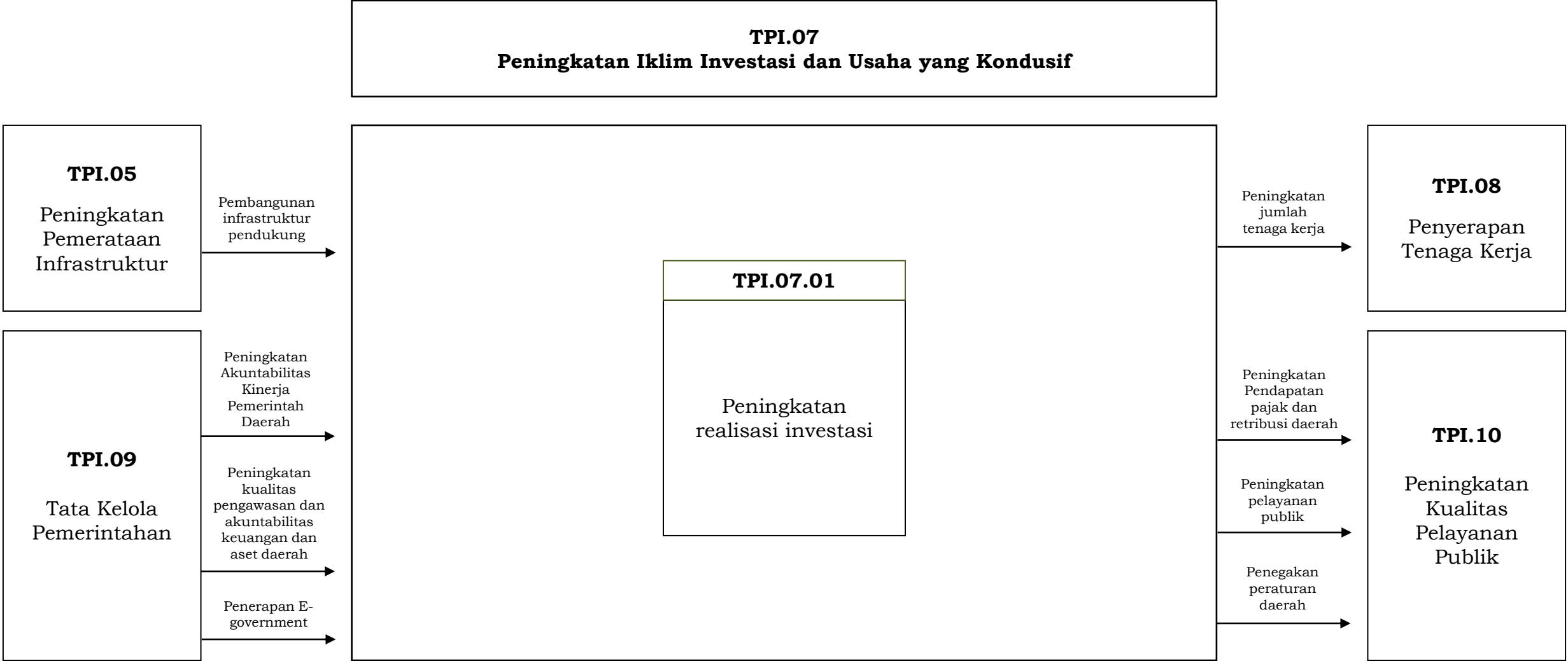
: TPI.06. Pelestarian Lingkungan Hidup
: TPI.06. 01. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
: TPI.06.01.CFM.02. Pengelolaan Persampahan



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

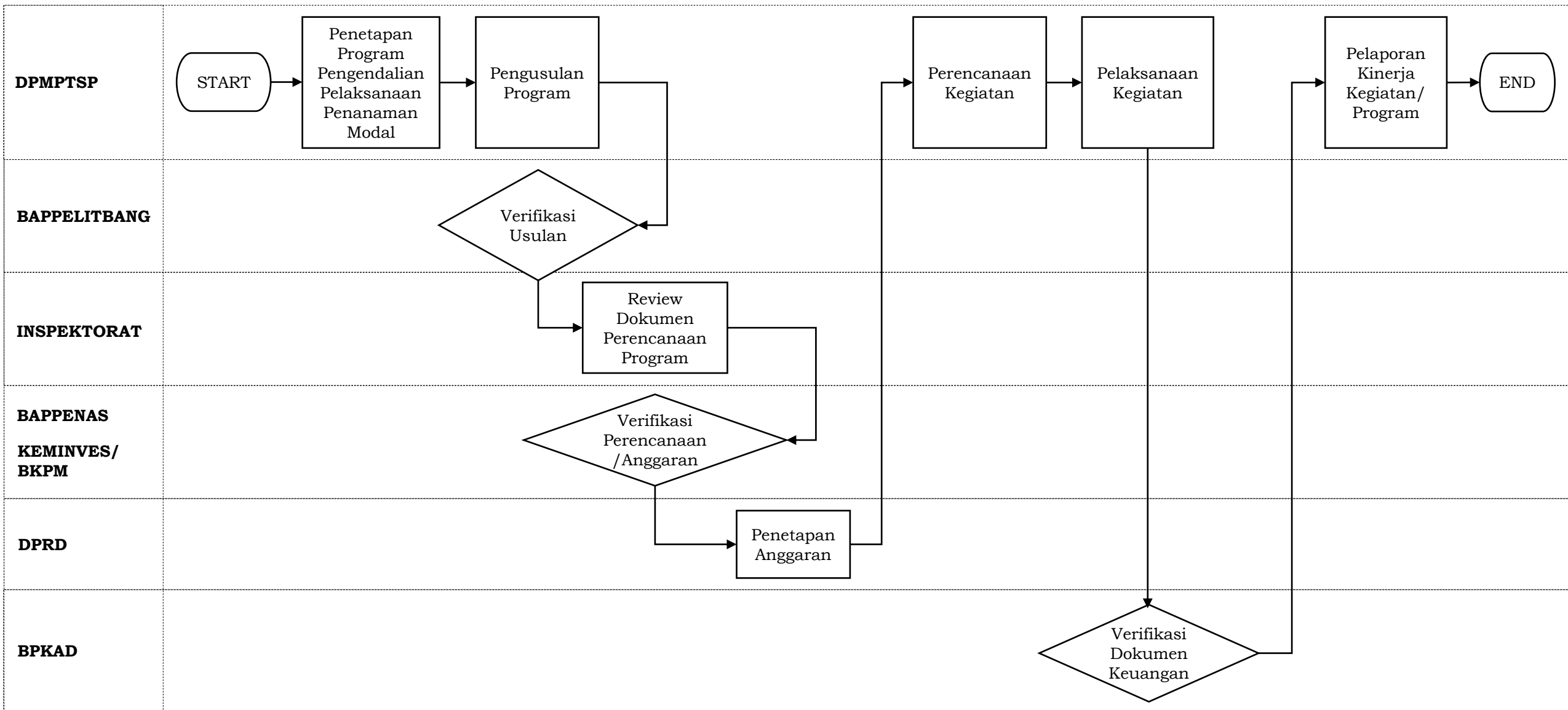
: TPI.06. Pelestarian Lingkungan Hidup
: TPI.06. 01. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
: TPI.06.01.CFM.03. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



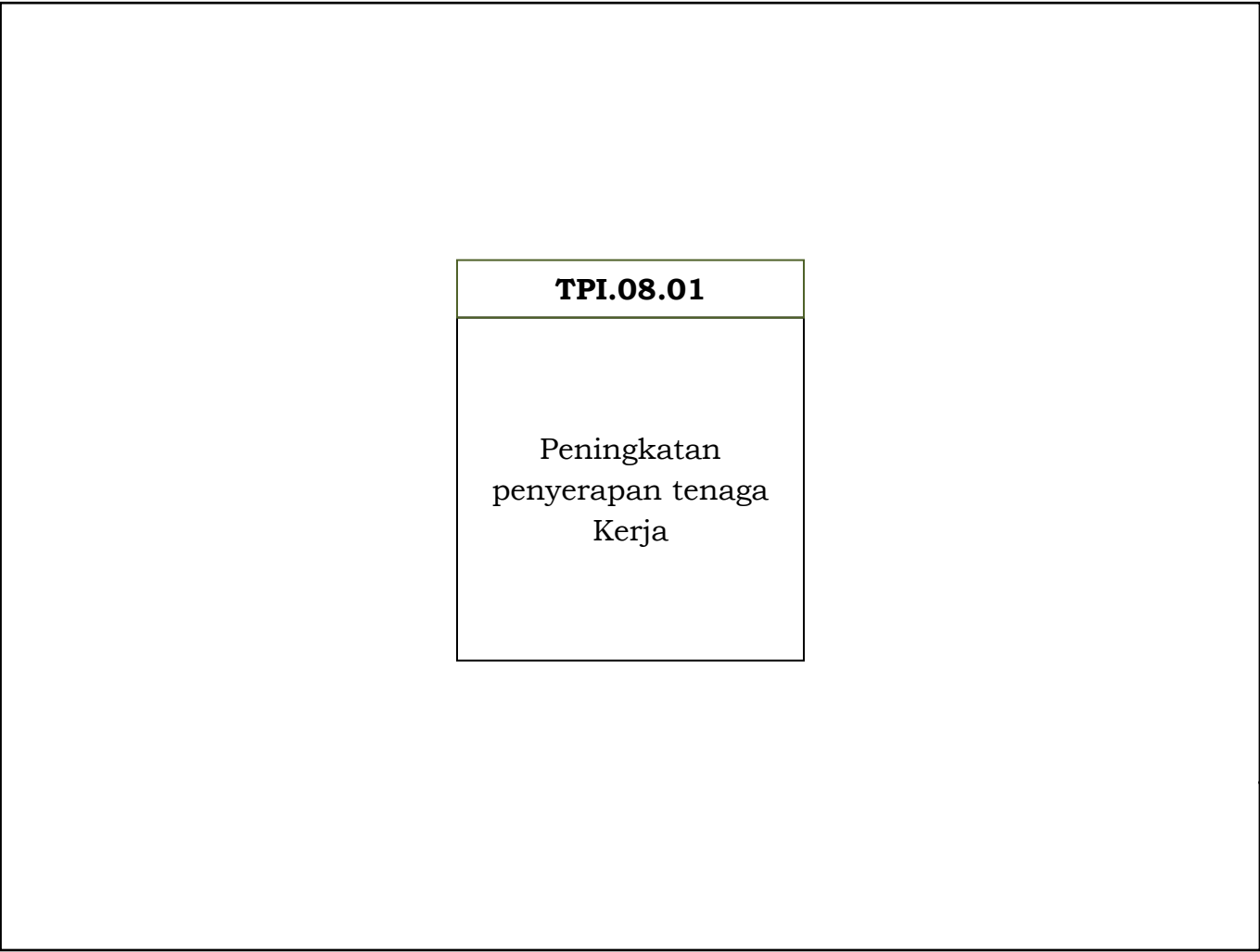


Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.07.TPI.07. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif
: TPI.07.01. Peningkatan Realisasi Investasi
: TPI.07.01.CFM.01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



TPI.08
Penyerapan Tenaga Kerja



TPI.05
Peningkatan
Pemerataan
Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pendukung

TPI.07
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Usaha yang
Kondusif

Iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

TPI.09
Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah

Penerapan E-government

Perumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

TPI.03
Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi

Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi daerah

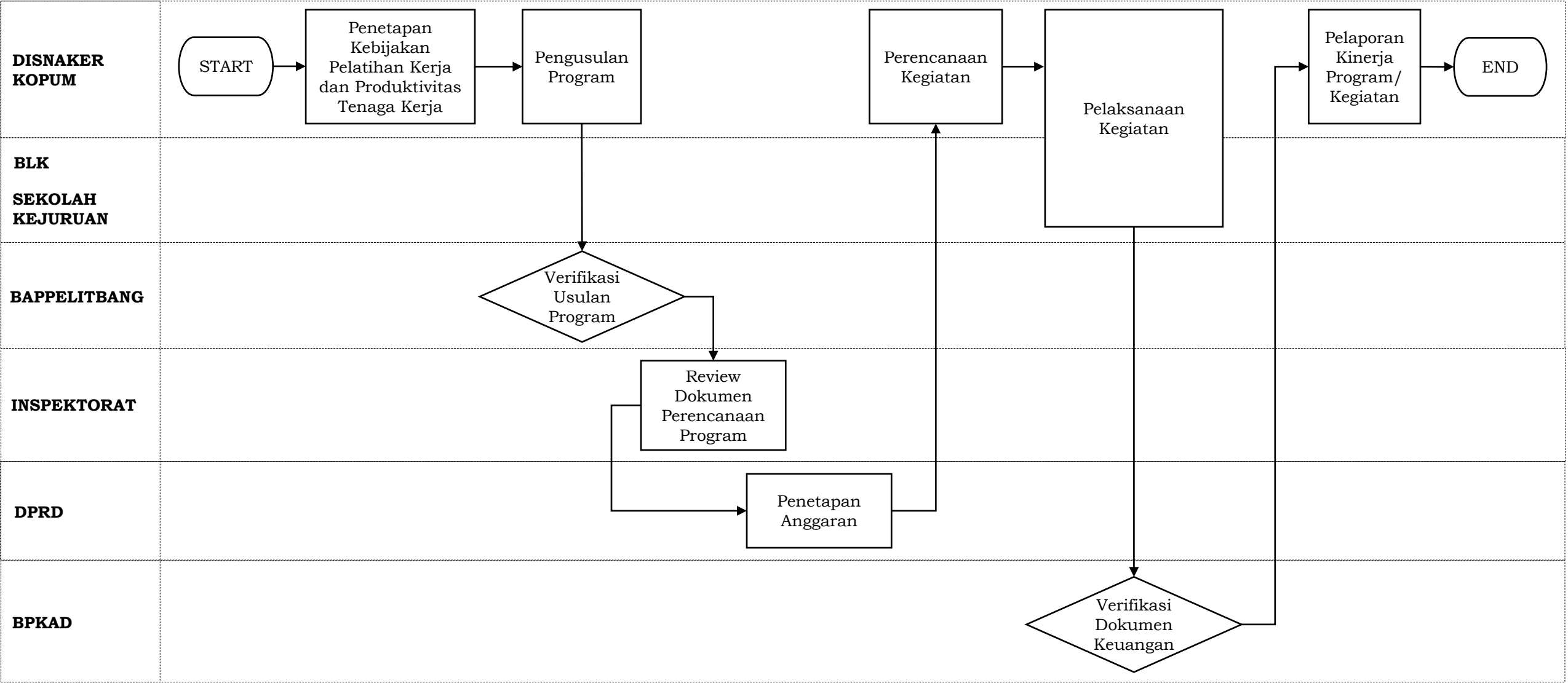
TPI.10
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Peningkatan pelayanan publik

Penegakan peraturan daerah

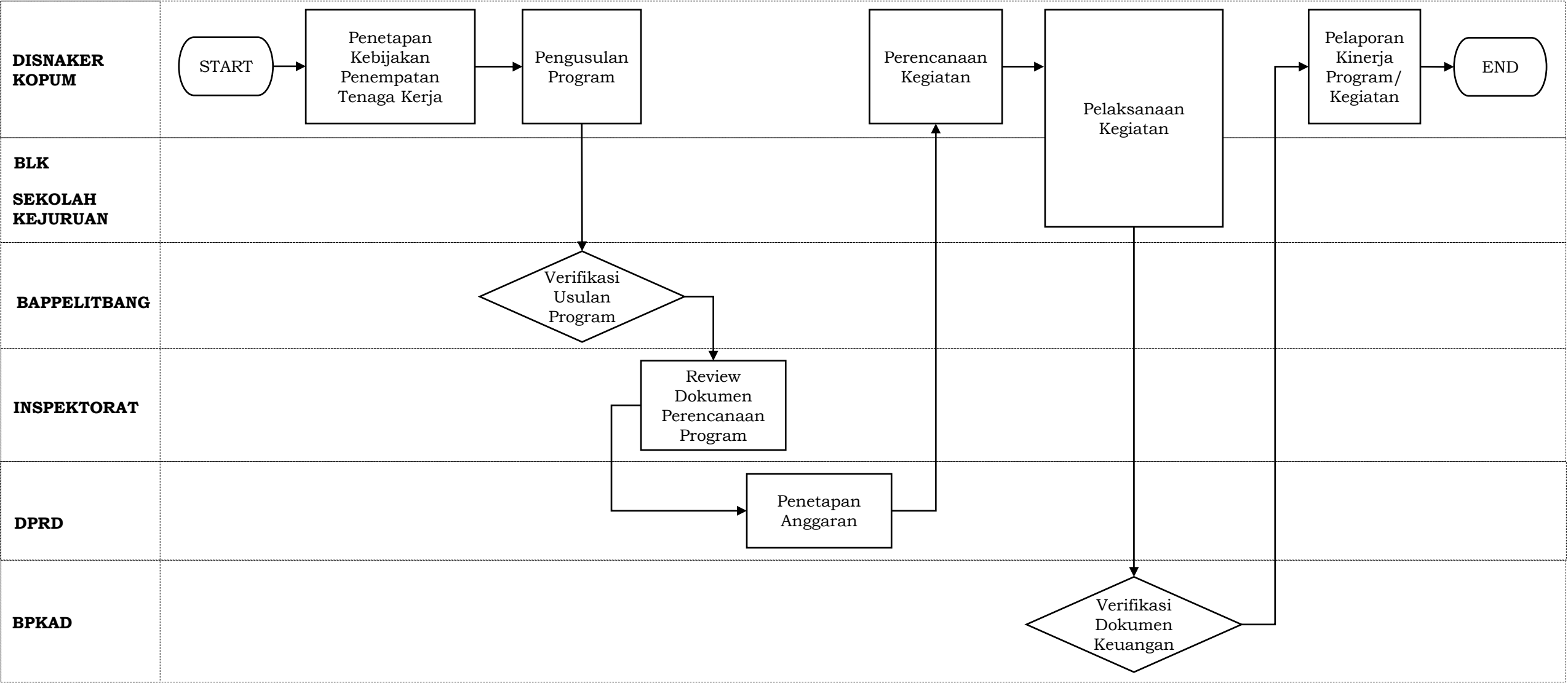
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.08. Penyerapan Tenaga Kerja
: TPI.08.01. Peningkatan penyerapan tenaga Kerja
: TPI.08.01.CFM.01. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



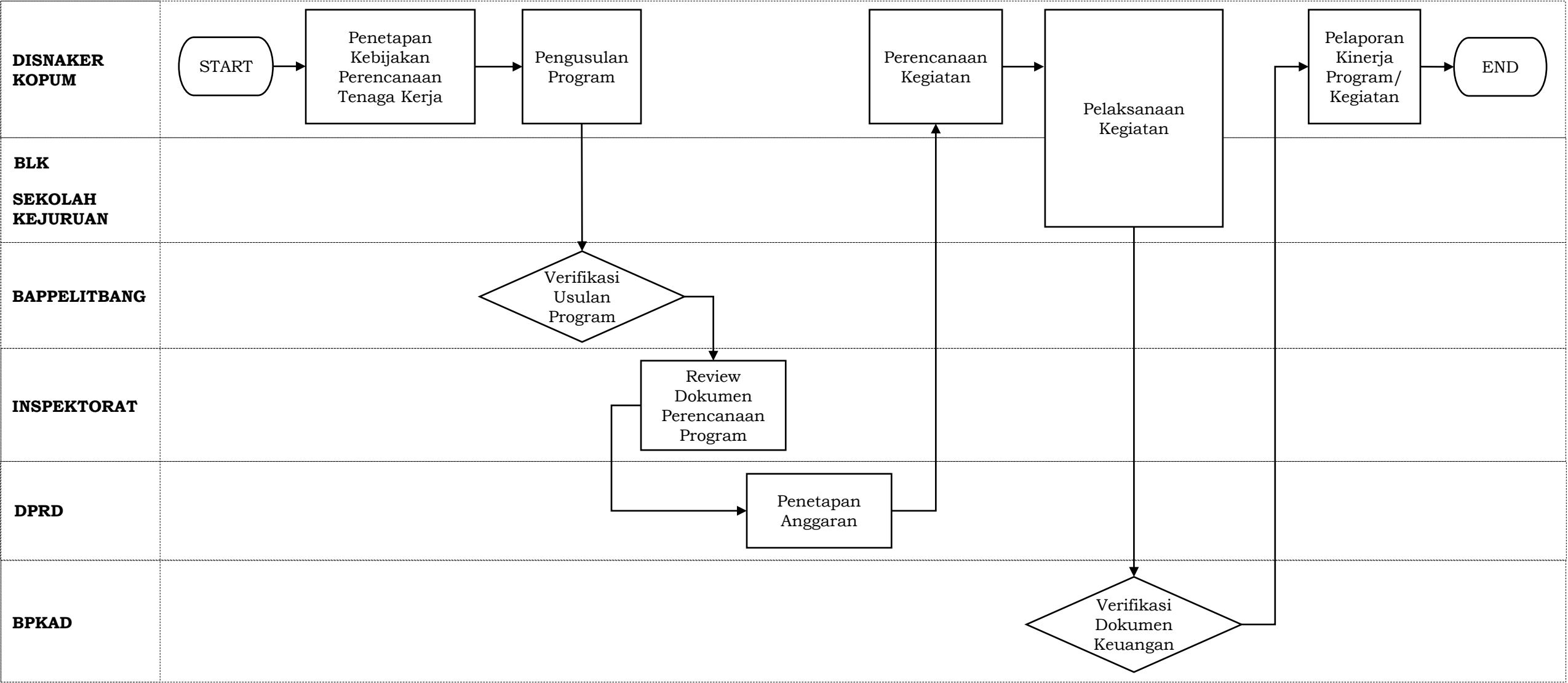
Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.08. Penyerapan Tenaga Kerja
: TPI.08.01. Peningkatan penyerapan tenaga Kerja
: TPI.08.01.CFM.02. Penempatan Tenaga Kerja



Peta Proses
Sub Proses
Lintas Fungsi

: TPI.08. Penyerapan Tenaga Kerja
: TPI.08.01. Peningkatan penyerapan tenaga Kerja
: TPI.08.01.CFM.03. Perencanaan Tenaga Kerja



PETA RELASI

PROSES UTAMA

TPI.01 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	
DISDIK	DPRD
DKP2KB	PERPUS PROV.
DISPORA	DINKES PROV.
DPK	BAPPENAS
SEKOLAH	KEMDIKBUDRISTEK
BAPPELITBANG	KEMENKES
INSPEKTORAT	KEMENPORA
BPKAD	PERPUSNAS
DPUPR	OKP

TPI.02 Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender	
DP3APM	DPRD
DINSOS	KECAMATAN
DISDUKCAPIL	KELURAHAN
DISDIK	RT/RW
DKP2KB	MASYARAKAT
BAPPELITBANG	BPJS
INSPEKTORAT	KEMENSOS
BPKAD	

TPI.03 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	
DISBUDPAR	BPCB BAT SANGKAR
DISPERDAGIN	DKP RPOV.
DP3	DISPERINDAG PROV.
BAPPELITBANG	BAPPENAS
INSPEKTORAT	KEMENPAREKRAF
BPKAD	KEMENDAG
DPRD	KEMENPERIN
TACB KOTA TPI	KKP

TPI.04 Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	
DISBUDPAR	
TACB KOTA TPI	
BPCB BAT SANGKAR	
BAPPELITBANG	
INSPEKTORAT	
BPKAD	
DPRD	

TPI.05 Peningkatan Pemerataan Infrastruktur	
DISPERKIM	UKPBJ
DPUPR	DPUPR PROV.
BAPPELITBANG	BAPPENAS
INSPEKTORAT	KEMENPUPR
BPKAD	SWASTA
DPRD	MASYARAKAT

TPI.06 Pelestarian Lingkungan Hidup	
DLH	BPKAD
DISDIK	DPRD
SEKOLAH	BAPPENAS
BAPPELITBANG	KLHK
INSPEKTORAT	

TPI.07 Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif	
DPMPTSP	
BAPPELITBANG	
INSPEKTORAT	
BPKAD	
DPRD	
BAPPENAS	
KEMINVES/BKPM	

TPI.08 Penyerapan Tenaga Kerja	
DISNAKERKOPUM	
BLK	
SEKOLAH KEJURUAN	
BAPPELITBANG	
INSPEKTORAT	
BPKAD	
DPRD	

PETA RELASI

PROSES PENDUKUNG

TPI.09 Tata Kelola Pemerintahan	TPI.10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
SETDA	SETDA
INSPEKTORAT	BPKAD
BPKAD	BPPRD
BAPPELITBANG	INSPEKTORAT
DISKOMINFO	BAPPELITBANG
DPRD	DISDUKCAPIL
	DPMPSTSP
	SATPOL PP
	DPRD

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH., MH.
Pembina
19781109 200604 2 021